

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1979 Tiongkok telah melakukan reformasi ekonominya yang menghasilkan pertumbuhan produk domestik bruto (GDP) rata – rata 10% pertahun.¹ Tahun 2010 adalah tahun yang dikenal sebagai “China Chock”, dan ditahun ini juga GDP Tiongkok melampaui Jepang hingga menjadikan perekonomian Tiongkok berada pada posisi kedua dunia. Meningkatnya ekonomi Tiongkok mendorong peningkatan di sektor militernya. Semenjak terjadinya peningkatan ekonomi negara Tiongkok mulai memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan militernya.

Sektor militer menjadi perhatian bagi Tiongkok sebab, negara ini menyadari jika militer menentukan nasib sebuah negara ketika berhadapan dengan negara lain. Sehingga keharusan bagi sebuah negara untuk terus meningkatkan keunggulan militernya, dan jika mungkin digunakan untuk menghambat militer negara lain.²

Peningkatan anggaran militer Tiongkok mulai terlihat besar sejak tahun 2000 hingga saat ini. Pada tahun 2000 anggaran militer Tiongkok 14,6 miliar dolar, pada 2001 menjadi 17 miliar dolar dan pada tahun 2008 menjadi 57,22 miliar dolar. Peningkatan anggaran militer Tiongkok melonjak tajam sejak tahun 2011 yaitu: 119,8 miliar dolar dan ditahun 2015 menjadi 232 miliar dolar.³

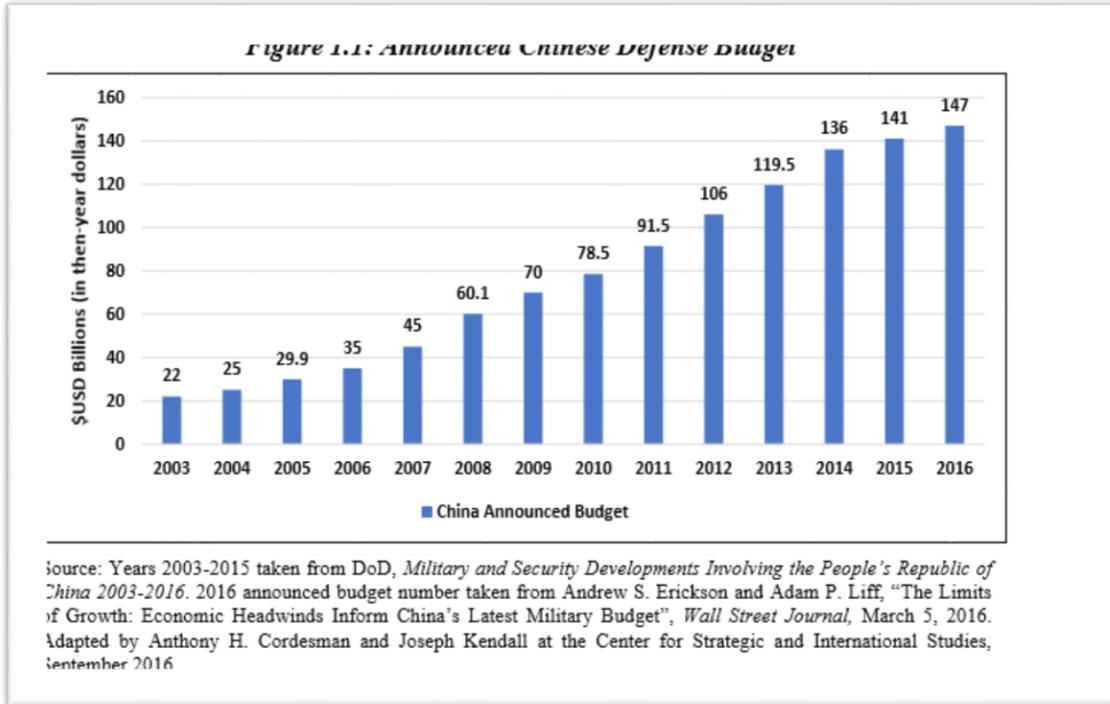
¹ Clement Allan Tisdell, “ Economic Reform and Openness in China: China’s Development Policies in Last Years,” economic analysis and policy, Vol 1, No 2, 2009.

² Clement Allan Tisdell hal 14.

³ Jhon Fetter and Sean Chen, “China’s Military Spending: Soft Rise or Hard Threat” Asia Perspective,” Vol 33, No 4, 2009.

Berikut data yang menunjukkan peningkatan anggaran militer Tiongkok.

1.1 Grafik Biaya Pertahanan Tiongkok Yang Diumumkan.



Kenaikan anggaran militer Tiongkok berdampak terhadap modernisasi dan penambahan jumlah personel tentaranya yang mana Tiongkok melakukan pembelian beberapa alutsista (alat utama sistem persenjataan). Tiongkok memiliki 2,3 juta personel aktif dan 1,2 juta personel cadangan, untuk angkatan darat Tiongkok memiliki 1,9 juta personel, 1,14 ribu tank, 14,500 satuan artileri dan 453 helikopter, sedangkan kekuatan udara Tiongkok memiliki 470 personel, 2556 pesawat tempur, 400 jet penyerang.⁴

Sementara untuk kekuatan laut Tiongkok memiliki 250 ribu personel, 66 kapal selam, 27 kapal perusak dan 52 perгат (*frigate*), sedangkan digudang senjata, Tiongkok

⁴ Global Security, "China Defense budget".
<https://www.globalsecurity.org/military/world/China/budget>. (Diakses pada 20 Desember 2018).

memiliki 100 ribu personel, 140 rudal nuklir dan 1.000 anti rudal. Modernisasi militer yang dilakukan Tiongkok membawa kekhawatiran terhadap negara Jepang dikarenakan Jepang adalah negara yang berdekatan secara geografis dan historis dengan Tiongkok.

Selain itu konflik masa lalu juga masih mewarnai hubungan keduanya. Meskipun Tiongkok dan Jepang menjalin hubungan kerjasama dalam berbagai bidang, akan tetapi konflik juga menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kedua negara ini, sehingga hubungan keduanya digambarkan dengan ungkapan *"economically hot and political cold"*.⁵

Secara ekonomi Tiongkok dan Jepang adalah dua negara yang menjalin hubungan kerjasama sejak 1970, kerjasama antara keduanya mengalami peningkatan yang besar sehingga saat ini kerjasama keduanya menjadi kerjasama terbesar ke – tiga di dunia.⁶ Kerjasama ekonomi Jepang dan Tiongkok meliputi 3 hal yaitu: perdagangan, investasi dan ekspor – impor.

Dalam perdagangan Tiongkok adalah mitra dagang yang besar bagi Jepang, jumlah perdagangan keduanya pada tahun 2011 berjumlah US\$ 345 miliar, untuk investasi Jepang menginvestasikan US\$ 6,9 miliar dan 22.307 perusahaan Jepang yang melakukan bisnis di Tiongkok. Jumlah ekspor pada tahun 2011 berjumlah 16,467.219 dan jumlah impor ditahun yang sama berjumlah 183,487.439.⁷ Kerjasama antara Jepang dan Tiongkok yang besar tidak menjamin jika tidak akan terjadi konflik antara kedua negara

⁵ Alice Ekman dan Celine Pajon, "Nationalism in China and Japan and Implication for Bilateral Relations," <https://www.ifri.org/en/publication/enotes/asiatic-vision/nationalism-china-and-japan-and-implication>. (Diakses pada September 2018).

⁶ Wayne M Morisson, "China's economic Rise : History, Trends, Challenges, and Implication for Bilateral Relations Internationales (IFRI)", *Asie Visions* [https://China.usc.edu/congressional-research-service-\"China's-economic-rise-history-trends-challenges-and-implications](https://China.usc.edu/congressional-research-service-\). (Diakses 1 Agustus 2018).

⁷ Anthony H Cordesman, Ashley Hess, Nicholas S. Yarosh, " Chinese Military Modernization and Force Development," *Center for strategis & international studies* www.csis.org (Diakses 3 Agustus 2018).

ini. Beberapa konflik yang muncul di kedua negara ini terjadi sejak adanya sengketa Laut Tiongkok Timur yang memancing konflik lainnya seperti : perselisihan atas pulau Senkaku/Diayou, perselisihan hak dan kepentingan maritim, angkatan laut Tiongkok lewat perairan internasional melalui kepulauan Jepang ke Pasifik Barat, pertahanan udara tumpang tindih zona indikasi (ADIZS).⁸

Selain konflik diatas, anggaran militer Tiongkok menjadi permasalahan bagi Jepang karena ditemukan fakta bahwa pada tahun 2006 Tiongkok menyatakan akan menaikkan anggarannya sebesar 17,6 % yaitu sebesar US\$ 57,2 miliar, namun banyak negara yang memperkirakan jika anggaran militer Tiongkok sebesar US\$ 97 miliar dan bahkan 139 miliar.⁹ Berdasarkan data non Tiongkok, anggaran militer Tiongkok berada pada urutan pertama di Asia Timur. Hal ini dikemukakan oleh Sukhee Han dalam tulisannya *China Pursuit of Peaceful Power Transition: a cases of ICT Standard*. Permasalahan ini menjadi alasan yang membuat Jepang resah terhadap peningkatan dan modernisasi militer Tiongkok, Jepang resah terhadap peningkatan dan modernisasi Tiongkok, bagi Jepang Tiongkok adalah negara yang dianggap sebagai “musuh” sehingga kekhawatiran Jepang tersebut dinyatakan dalam *white paper* Jepang pada tahun 2011 yang berbunyi :

*“some of these ten vessels conducted exercises in the middle of East China sea before advancing to the pacific Ocean. At the time, a Chinese shipborne helicopter conducted a proximate flight towards and Japanese destroyer Suzumi, which was monitoring the Chinese Vessels. At its nearest it came a distance of approximately 90 m horizontally and the attitude was approximately 30 m. Since it was recognized that flying in this manner posed a danger to safe navigation of the Japanese Vessels, the recognition was conveyed to the Chinese government to inquire after fact via diplomatic router. Later another Chinese Shipborne”.*¹⁰

⁸ Euran Graham, “Divining the Fluid Element: From Cooperation to conflict in Japan – Cina Maritime Relations,” Security Challenges, Vol 11 NO. 1.

⁹ Sukhee Han, “China Pursuit of Peaceful Transsition: a case of ICT standard”, International Area Review Vol .12 No 3.

¹⁰ Marga Berayu Putra, Analisis Konflik Laten Jepang – Cina “jurnal ilmu hubungan internasional. Vol 3 No 1.

Sebagaimana tertulis dalam *white paper*nya, Jepang menyatakan bahwa Tiongkok adalah sebuah ancaman bagi negaranya beberapa insiden pun terjadi sebagai bukti pernyataan tersebut. Bermula pada tahun 2010 sebuah pukat Tiongkok bertabrakan dengan kapal patroli *Japan Coast Guard* atau disebut JCG yang berakibat pada penangkapan kapten Tiongkok, dan pada tahun 2012 dimasa pemerintah Yoshihiko Noda membeli 3 Senkaku Kepulauan dari pihak swasta dan juga mencegah akuisisi Jepang.

Pada bulan Desember 2012 delapan hingga lima belas jet Jepang bergegas mencegat pesawat pengintai laut Tiongkok diatas pulau Senkaku/Diayou, pertahanan Jepang mengklaim bahwa kapal Navy PLA Tiongkok telah mengaktifkan panduan misilnya. Insiden ini kemudian membuat Jepang beranggapan jika Tiongkok adalah perusak pembangunan Jepang. Pada tahun 2013 Tiongkok sering mengirim kapal patroli dan kapal penangkap ikan dari lembaga maritimnya. Pada tahun 2014 Shinzo Abe dan Xi Jinping bertemu untuk pertama kalinya, akan tetapi keduanya tidak melakukan jabat tangan.¹¹ Pada 6 Agustus kapal perang Tiongkok memasuki Laut Tiongkok Timur dengan jumlag lima belas kapal dan ditemani lebih dari 230 nelayan.¹²

Hal ini tentu saja meresahkan Jepang dan memaksa Jepang untuk melakukan upaya menindak lanjuti tindakan Tiongkok. Militer Tiongkok adalah sebuah ancaman yang serius bagi Jepang. Sehingga Jepang diharuskan untuk melakukan upaya dalam menjaga keamanannya sendiri. Modernisasi militer Tiongkok mengubah pertahanan Jepang dan meningkatkan keamanan yang jauh lebih berat terutama di maritim, pasukan militer konvensional Tiongkok menjadi ancaman langsung atas maritim dan udara.

11 for an official record of the Incursions the contiguous zone and territorial waters around the Senkaku Island, sea, ministry of foreign affair (Japan)” Trends in Chinese Government and other vessels.

12 Ministry of foreign Affair (Japan)” status of activies by Chinese Government Vessel and Chinese Fishing Vessel in waters sisrounding the Senkaku Island “ <http://www.mofa.go.jp/file/08118283>.

Kehadiran militer Tiongkok di perairan Jepang mendorong Jepang untuk melakukan peningkatan investasi dalam intelijen, pengawasan dan kemampuan pengintaian, Jepang juga membentuk Dewan Keamanan Nasional pada tahun 2013.

Jepang melihat peningkatan militer Tiongkok terutama dalam angkatan laut adalah sebuah ancaman serius disebabkan sengketa Laut Timuur yang tak kunjung usai. Sebagai tanggapan Jepang atas peningkatan militer Tiongkok, Jepang merumuskan NDPG (*National Defense Program Guideline*) pada tahun 2010 untuk diimplikasikan pada 2011. Dalam NDPG tahun 2011 terdapat perubahan dan peningkatan penggunaan kekuatan yang terdapat dalam NDPG tersebut, salah satunya adalah konsep pertahanan Jepang.¹³

Sebelumnya konsep pertahanan Jepang hanya (*Basic Defense Force*) hanya menitik beratkan pada pembangunan kekuatan pertahanan. Pada tahun 2011 konsep tersebut berubah menjadi (*Dynamic Defense Force*) yang memaksa Jepang melakukan tindakan yang lebih aktif dengan menjalankan serangkaian operasi militer secara rutin dengan menjalankan serangkaian operasi intelijen. Selain melakukan perubahan terhadap pertahanannya Jepang juga meningkatkan anggarannya yang dilakukan pertama kali pada tahun 2011.

Peningkatan serta modernisasi militer yang dilakukan oleh Tiongkok telah merubah sistem militer Jepang yang tadinya anti militer sebagaimana tercantum dalam pasal 9 Jepang yang berbunyi:

*“Aspiring sincerely to an international peace on justice and order, the Japanese people forever renounce war a sovereign right of the threat or use of force as means of setting international disputes, In order to accomplish the aim of the preceding paragraph lands, sea and forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.”*¹⁴

¹³ Ministry Of Defense (MOD).2000 . chapter 2 “ The Basic of Japan’s policy” [http:// www.mod.go.jp/e/publ/w-paper-pdf/2006/2-2-1](http://www.mod.go.jp/e/publ/w-paper-pdf/2006/2-2-1). (Diakses 8 April 2018).

¹⁴ The Constitution of Japan.Prime Minister of Japan and Hiz Cabinet.

Pada pasal diatas telah dijelaskan jika Jepang tidak akan berperang sehingga angkatan laut, angkatan darat dan angkatan udara tidak akan dikelola dan hak negara untuk menyatakan perang tidak akan diakui. Akan tetapi sengketa yang terjadi antara Jepang dan Tiongkok telah menjadikan negara Jepang sebagai negara memberikan perhatian penting terhadap militernya.

Jepang memandang Tiongkok dengan perhatian sebagai musuh, dan belanja militer yang tidak transparan membuat Jepang resah sehingga Jepang terus berupaya untuk melahirkan kebijakan – kebijakan untuk melindungi negaranya. Ketika negara mulai mementingkan isu keamanan dalam kebijakan negaranya, hal ini dapat dipahami bahwa negara tersebut merasa terancam dengan peningkatan militer yang dilakukan oleh negara tetangga. Dalam hal ini Jepang merasa terancam dengan peningkatan militer Tiongkok dan akhirnya membuat beberapa kebijakan. Kebijakan – kebijakan tersebut lebih banyak menggunakan konsep defense/ bertahan seperti: perubahan anggaran militer, serta modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan). Penelitian ini berusaha menganalisis respon Jepang terhadap Tiongkok tersebut bersifat defensif atau ofensif.

1.2 Rumusan Masalah

Peningkatan ekonomi Tiongkok menjadi faktor pendorong untuk Tiongkok melakukan peningkatan anggaran militernya. Peningkatan anggaran militer mendorong Tiongkok untuk melakukan modernisasi militer baik dalam peningkatan personel, maupun penambahan alutsistanya. Hal ini menjadi ancaman bagi negara Jepang disebabkan oleh konflik yang tidak berkesudahan diantara mereka, Jepang mengasumsikan jika peningkatan kapabilitas militer Tiongkok akan berdampak negatif terhadap keamanan negaranya

sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut bagaimana respon pemerintah Jepang terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Respon Pemerintah Jepang Terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer Tiongkok?

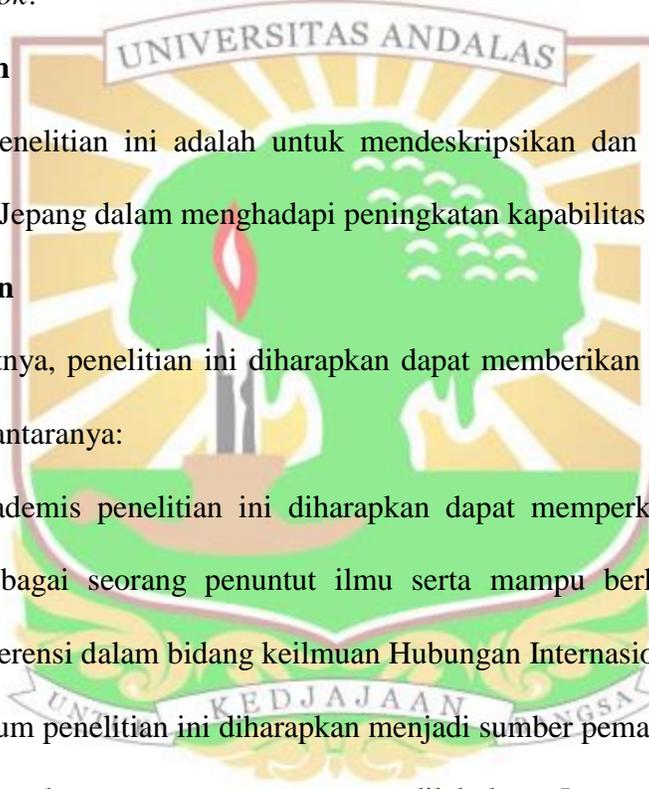
1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan militer pemerintah Jepang dalam menghadapi peningkatan kapabilitas militer Tiongkok.

1.5 Manfaat Penelitian

Untuk selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk semua kalangan diantaranya:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan bagi peneliti sebagai seorang penuntut ilmu serta mampu berkontribusi dan menjadi sumber referensi dalam bidang keilmuan Hubungan Internasional.
2. Secara umum penelitian ini diharapkan menjadi sumber pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang upaya yang dilakukan Jepang terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok.



1.6 Studi Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa karya ilmiah sebagai bahan rujukan penulis untuk menulis ancaman Jepang, maupun militer Tiongkok.

Studi pustaka yang pertama yaitu: karya dari Sean and Jhon Fetter yang berjudul “*China Military Spending : Soft Rise or Hard Threat.*” Tulisan ini menyatakan bahwa pengeluaran militer Tiongkok telah menjadi masalah yang berdampak penting terhadap kawasan. Tulisan ini melihat perkiraan militer Tiongkok tidak sesuai antara jumlah anggota dan juga alasan geopolitik Tiongkok yang mendorong perencanaan militer Tiongkok meskipun Tiongkok menerbitkan, anggaran pertahanan resmi dan menyediakan pembenaran untuk peningkatan pengeluaran militer sebagian besar pengamat tetap memandang skeptis terhadap upaya modernisasi militer Tiongkok.¹⁵

Tiongkok memandang penumpukan militer sebagai bagian alami dari kenaikan status negara menuju kekuatan besar, ketidakpastian yang menyangkut pengeluaran militernya meruntuhkan anggapan bahwa kebangkitan militer Tiongkok akan menciptakan perdamaian. Dalam tulisan ini dapat dipahami jika kurangnya transparansi yang diberikan pemerintah Tiongkok untuk menghitung pengeluaran militer Tiongkok, meskipun setiap tahunnya pemerintah mengumumkan pengeluarannya secara terbuka.¹⁶

Tulisan ini menggambarkan bahwa Tiongkok tidak secara terbuka memberikan data pengeluaran militernya dan selalu menyatakan jika modernisasi militernya seimbang dengan peningkatan ekonominya. Hal ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar dari semua pihak terkait pengeluaran Tiongkok terhadap militernya tersebut. Tulisan ini telah

¹⁵ China Rising, “Kebijakan Luar Negeri Peningkatan Damai Cina ke Status Kekuatan Besar” *Urusan Luar Negeri* Vol.85 No.5.

¹⁶ China Rising hal 20.

membantu penulis menemukan data – data yang dapat penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini juga membantu penulis dalam menemukan konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Studi pustaka yang kedua yaitu tulisan dari Robert D. Kaplan dalam tulisannya yang berjudul “*How We Would Fight China*” yang menyatakan jika selama ini tidak ada angkatan laut maupun angkatan udara lain yang menjadi ancaman bagi Amerika Serikat, namun itu akan berubah. Angkatan Laut Tiongkok siap untuk *push out to pacific* dan ketika hal tersebut terjadi, akan sangat mudah dan cepat bagi Tiongkok untuk menghadapi angkatan laut yang enggan mengalah dari pesisir darat Asia. Pada dekade mendatang Tiongkok akan menggunakan strategi *asymmetric back – and forth* dan mengambil keuntungan tidak hanya ke Asia Tengah yang aka mengambil keuntungan tidak hanya garis pantai yang luas tetapi juga basis garis belakangnya yang membentang jauh hingga ke Asia Tengah yang akhirnya dapat melakukan *lob misile* secara akurat pada jalur pelayaran Pasifik.¹⁷

Tiongkok memiliki potensi menguntungkan yang berbeda bahkan jika Tiongkok tertinggal dalam kekuatan dan kecakapan teknologi, personel militernya adalah siswa dengan cepat belajar. Hal ini berkembang secara bertahap dari *soft power* yang menunjukkan prestasi dan penghargaan tertentu. Tulisn ini mengemukakan tentang kebangkitan kekuatan militer Tiongkok dan telah membantu penulis dalam menemukan masalah yang akan penulis teliti. Perbedaan penelitian yang ada dalam jurnal daan yang peneliti teliti adalah terletak pada unit analisis, jika dalam jurnal unit analisisnya adalah Amerika maka dalam penelitian ini unit analisisnya adalah Tiongkok.

¹⁷ Robert D Kaplan,” How Do We Flight Cina “<http://www.theatlantic.com//archive/2005/06/how-we-would-fight-china/303959>. (Diakses pada 2 September 2018.)

Studi pustaka ketiga adalah tulisan dari Wellington Amorim dan Antonio Henrique Luceda da Silva yang berjudul *Japan And India : Soft Balancing as a Reaction to China's Rise?* Asia menjadi kawasan ekonomi yang sangat dinamis di dunia dan juga menghadapi perubahan penting dalam kekuatan militer, Jepang dan India sebagai ekonomi terbesar di Asia Pasifik disamping Jepang termasuk pihak yang sensitif dengan Tiongkok. Terlebih hubungan Jepang dan Tiongkok yang tidak mudah. Tiongkok menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia Timur dengan kapasitas mendeter Jepang dimasa depan.

Dalam tulisan ini penulis juga menganalisis sikap India dan Jepang terhadap keamanan kawasan atas ancaman yang diterima dari Tiongkok. Tulisan ini menggunakan konsep M.Walt, yang mendefenisikan empat sumber ancaman yaitu: *aggregate power, geographic proximity, offensive power, aggressive intention*. Selain Walt, artikel Paul yang memperdalam arti dari keseimbangan ke dalam 3 tipe: *hard balancing, soft balancing, asyetric balancing*. Kerjasama antara India dan Jepang dilihat dari jurnal ini sebagai upaya kedua negara untuk menyeimbangkan kebangkitan Tiongkok.¹⁸

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah dalam jurnal ini menjelaskan 4 ancaman yang mengancam Jepang dalam peningkatan militer Tiongkok sedangkan dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan konsep ancaman.

Studi pustaka keempat berjudul *The Politics of Contentation in Asia: How Japan and Pakistan Deal with Their Rising Neighbhors* oleh Hannes Ebert, Daniel Flames and Georg Struver. Kawasan Asia Timur terdapat pergantian dramatis dalam kapasitas militer dan kekuatan ekonomi utama, sedangkan di Asia Selatan, India telah merubah pengaruh

¹⁸ Silva da Luceda Hendrique, dan Amorim Wellington, "Japan and India : Soft Balancing as a Reaction to China's Rise. Rev. Bras".Politik Internasional. 2014, hal 73-90.

ekonomi menjadi pengaruh politik untuk regionalnya hal ini menjadikan tetangga kedua negara berada pada negara seperti Jepang Pakistan berada pada kekuatan kedua negara masing – masing kawasan. Tulisan ini juga menginvestasikan dua kekuatan besar dari pemimpin kekuatan Asia pada dekade terakhir. Dalam tulisan ini juga dijelaskan jika strategi India terhadap Tiongkok yang mendominasi Asia dimana India berusaha mengimbangi Tiongkok.¹⁹

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian peneliti adalah jika dalam tulisan ini mengedepankan pengaruh ekonomi Tiongkok sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus pada bagaimana Jepang merespon tindakan peningkatan kapabilitas militer Tiongkok.

Studi pustaka terakhir adalah tulisan Benoit Hardy – Chartand yang berjudul *Misperception*, perbedaan persepsi sejarah dimana Beijing telah meminta tetangganya tersebut untuk mengambil sikap memperbaiki sejarah agresi sebelum dan sesudah Perang Dunia II, tidak hanya Jepang dan Tiongkok tetapi juga di kawasan. Sejak September 2012, kedua negara ini saling menuduh satu sama lain menunjukkan ancaman bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Timur. Artikel ini mengeksplorasi sifat dan wacana resmi dan tidak resmi serta persepsi umum di Jepang dan Tiongkok berdasarkan hubungan bilateral kedua negara. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi peneliti dalam melihat bagaimana pandangan yang dimiliki kedua negara tersebut dalam memandang satu sama lain. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah, jika artikel ini fokus pada persepsi Jepang terhadap Tiongkok dan dalam penelitian ini fokus pada respon Jepang terhadap peningkatan kapabilitas militer negara Tiongkok.

¹⁹ Elbert Hannes,” The Politics of Contestation in Asia : How in Japan and Pakistan Deal with their Rising Neighbors,”Germana Institute of Global and Area Studies Working Paper No.2 hal 1- 35.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Ofensif – Defensif Realisme.

Realisme ofensif - defensif adalah sebuah konsep yang muncul pada tahun 1979, yang kemudian dipopulerkan dalam menganalisis hubungan internasional, dan berangkat dari politik internasional dan teori kebijakan luar negeri. Kenneth Waltz telah membuat pandangan tentang perbedaan keduanya. Politik internasional merupakan hasil dari perilaku masing – masing negara dan interaksi antara negara yang dapat memberitahu tentang lingkungan eksternal dan tekanan – tekanan yang dihadapinya. Kebijakan luar negeri dan politik internasional maka terbentuklah sistem internasional, menurut realis struktural sistem internasional adalah anarki. Sehingga setiap negara yang bertugas untuk mencari keamanan, realisme struktural memiliki 2 varian yaitu: Realisme Ofensif – Realisme Defensif.²⁰

1.7.2 Realisme Ofensif

Realisme Ofensif dari Jhon Mearsheimer mencoba memberikan penjelasan tentang keamanan yang menyatakan jika negara berusaha meningkatkan keamanan dengan cara mengurangi keamanan negara lain. Realisme ofensif berpendapat bahwa kemungkinan kekalahan untuk setiap negara dapat diringkas dalam ukuran kekuatan relatif mereka.

Realisme ofensif memiliki karakteristik yaitu:

1. Negara berusaha bertahan dibawah anarki dengan memaksimalkan kekuatan mereka terhadap negara lain.
2. Kerjasama adalah hal yang sulit karena ketergantungan akan menyebabkan terjadinya kecurangan, dan kecurangan adalah hambatan utama untuk kerjasama dalam sistem internasional.

²⁰ Stephen Van Evera, "Offense, Defense, and the Causes of War," *International Security* Vo.22, No.4.

3. Anarki memaksa negara untuk memaksimalkan pengaruh.
4. Persaingan dalam perjuangan yang tidak pernah berakhir di hegemoni serta terlibat dalam perluasan wilayah.

1.7.3 Realisme Defensif

Ada 4 karakteristik realisme defensif yaitu:

1. *Security Dilema* Yang Tidak Terkendali.

Charles Glaser mengemukakan ada 3 cara untuk menunjukkan hal yang membuat lawan dari negara menjadi tidak aman, ketiga cara itu adalah:

- Kebijakan untuk mencari keamanan akan membuat negara mengurangi kemampuan militernya atau kemampuan untuk melakukan misi militer tertentu.
- Strategi *self help* akan dapat meningkatkan nilai dari permusuhan pada tahap yang lebih luas sebagai bagian dari *self defence* yang akan mengakibatkan deterren atau pencegahan akan semakin sulit.
- Pengembangan kapasitas militer dan aliansi militer yang dilakukan bisa merubah keyakinan musuh terhadap motif satu negara, dengan demikian semakin menyakinkan musuh jika negara tersebut berbahaya dari sebelumnya, musuh dapat disimpulkan bahwa negara tersebut memiliki motif yang rakus dengan alasan yang lain selain keaman.

2. Perubahan Struktural Dan *Security Dilema*.

Dilema keamanan tidak dapat dihindari akan tetapi hal tersebut tidak senantiasa akan menghasilkan persaingan yang ketat dan perang selain dari pada *distribution of power* dalam sistem internasional. Faktor – faktor material lainnya menurut Thalia Ferro

disebut sebagai perubahan struktural (*structural modifier*). Faktor tersebut yaitu: militer, kedekatan geografis, akses pada sumber daya material regional dan kemudahan yang diberikan suatu negara untuk mendapatkan sumber daya dari negara yang ditaklukan.

3. Pengaruh Dari Kapasitas Materil Suatu Negara.

Realisme defensif berasumsi bahwa distribusi power yang sifatnya jangka pendek, relatif tidak pasti dan para pemimpin negara sering menghadapi informasi yang rancu dan kontradiktif, oleh karena itu teori – teori kebijakan luar negeri bersandar pada peran eksplisit dari sistem kepercayaan pemimpin ini dapat dilihat dari *image* musuh dan data intelijen yang memberikan penilaian baik, rencana militer dan kebijakan luar negeri.

4. Politik Domestik Dan Kepentingan Sistematis.

Realisme defensif melihat bagaimana politik domestik dan kepentingan sistematis mampu memberikan pandangan terhadap kondisi musuh yang pada akhirnya melahirkan kebijakan.²¹

1.7.4 Perbedaan Ofensif Realisme dan Defensif Realisme

Realisme ofensif menyatakan untuk mencapai keamanan harus melakukan tindakan mengurangi kapabilitas negara lain. Ofensif beranggapan jika negara – negara memiliki sifat ilmiah yang cenderung berkonflik dan konflik dipandang bukan sebagai kebetulan tetapi kondisi yang diperlukan karena ofensif melihat negara di dunia memiliki perasaan *insecurity* satu sama lain. Oleh karena itu mereka menyerang satu sama lain sebab asumsi mereka “aku bunuh kamu atau kamu bunuh aku” dalam melihat sistem internasional bagi mereka negara hanya memiliki sedikit kesamaan kepentingan atau tidak sama sekali karena hal ini ofensif tidak mengakui kerjasama kecuali aliansi sementara.

²¹ Jeffry W.Thalia Ferro,” Security seeking under anarchy”.International security,” Vol 125 No.3.

Disebabkan karena negara tidak mengakui kerjasama dan perasaan takut diserang terlebih dahulu. Bagi mereka dari pada membangun kerjasama lebih baik mereka mengalokasikan seluruh sumber daya mereka untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi konflik.²² Sementara bagi realisme defensif untuk mencapai keamanan negara tidak harus menyerang negara lain karena asumsinya, untuk melihat konflik sulit diidentifikasi bagi mereka walaupun mereka setuju jika kepentingan negara tidak sama, namun kepentingan tidak harus diselesaikan dengan kekerasan. Kerjasama dapat diselesaikan sebagai jalur alternatif. Untuk membedakan realisme ofensif dan defensif dapat dilihat dari 4 kategori yaitu:

1. Ideologi.

Negara yang ofensif memiliki sifat agresif biasanya dia memiliki karakteristik berdasarkan ideologi ekstrim dan intoleran. Negara seperti ini biasanya ditakuti oleh negara tetangga mereka, karena rasa curiga bahwa negara tersebut memiliki rencana untuk memaksakan ideologinya terhadap negara lain. Hal ini didasari oleh sifat dan ideologi yang memiliki justifikasi terhadap nominasi pada orang lain.

Bagi negara dengan karakteristik seperti ini perkembangan ideologi moderat dipandang oleh pemimpin sebagai sesuatu yang merugikan dalam hal ini modernisasi ideologi dapat membuat hilangnya kebijaksanaan kepemimpinan dari legitimasi politik dari keseluruhan. Hal ini berbeda dengan defensif, yang berasumsi jika pemimpin yang agresif dan tidak toleran merupakan salah satu sinyal nyata jika negara tersebut tidak ragu untuk menyerang.

²² Tang Shiping, "from offensive to defensive realism" hal 40.

2. Kebijakan Terhadap Minoritas Domestik.

Seorang pemimpin yang nasionalis dan tidak ragu dalam mendiskriminasi masyarakat disekitarnya cenderung tidak akan ragu untuk menyerang negara lain. Mereka menilai bahwa diskriminasi tidak akan luput dalam sistem internasional.

3. Kebijakan Terhadap Negara Tetangga Yang Lemah

Dapat dijadikan sebuah sinyal, negara yang agresif cenderung mendominasi jika tujuannya tidak mendominasi atau mencaplok. Mereka memiliki motivasi untuk membentuk sistem protektorat dan negara clain. Negara ini tidak peduli pada masalah internal, tapi tujuannya adalah mengimbangi negara kuat yang menginginkan keamanan ini dengan cara mempengaruhi hak otonomi dari negara yang lemah.

4. Kebijakan Militer Dan Penagawasan Persenjataan.

Secara umum sinyal harus memiliki elemen penurunan kegagalan satu level bagi persiapan militer. Kegagalan dalam meningkatkan satu stok jenis senjata dipandang sebagai satu analisis spiral. Menurut Glaser negara yang berusaha untuk menurunkan kapabilitas militer mereka dan berusaha berubah menjadi negara defensif dan dipandang sebagai sinyal nyata. Bahwa negara itu merupakan negara yang benar – benar agresif, sebab bisa saja perjanjian damai mereka (*perjanjian arm control*). Dapat dilanggar kapan saja apabila negara lain juga terpengaruh dalam menurunkan kapabilitas militer mereka saat itu negara memperlihatkan niat mereka.

Realis ofensif melihat ketidakpastian dalam sistem internasional dalam keamanan membuat negara saling curiga satu sama lain. Sementara realisme defensif melihat apa

yang menjadi penyebab dari dilema keamanan itu sendiri.²³

1.8 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk melihat masalah dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.²⁴

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Proses – proses dalam penelitian kualitatif akan melibatkan upaya – upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan – pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna yang telah didapat.²⁵

1.8.2 Unit dan Level Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, atau dijelaskan.²⁶ Unit analisis dalam penelitian ini adalah negara Jepang. Sedangkan unit eksplanasi atau disebut juga variabel independen. Unit eksplanasi adalah unit yang mempengaruhi unit analisis, dalam penelitian ini unit eksplanasinya adalah peningkatan kapabilitas militer Tiongkok. Tingkat analisa merupakan tindakan objek yang menjadi fokus utama dalam pembahasan sebuah penelitian. Tingkat analisis adalah

²³ Tang Shiping, "From offensive to defensive realism", hal 151.

²⁴ Jeffrey E. Kline and Wayne P. Hughes, Jr., "Between Peace and The Air – Sea Battle: A war At sea strategy" Naval war college review. Vol 65 No 4.

²⁵ Jhon W. Crewell. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4th Edition, California, SAGE publication (2013).

penelitian berada pada tingkat negara. Hal ini ditentukan karena dalam penelitian ini peneliti melihat upaya apa yang dilakukan Jepang terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan informasi tentang pengetahuan yang sedang dipelajari. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ini berupa studi kepustakaan dengan mempelajari penelitian atau informasi – informasi yang didapat berupa: jurnal, dokumen, buku – buku, *website* dan sumber berita terkait. Dilihat dari jenisnya, penelitian yang akan dilakukan menggunakan data sekunder atau *secondary resource*.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulam data merupakan proses berkelanjutan dalam mengolah data – data yang didapat secara mendalam. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan identifikasi dari pencarian pola – pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.²⁷ Peneliti mengumpulkan data dan mengelompokkan serta menginterpretasikan data tersebut sehingga menjadi menjadi sumber sumber yang relevan yang dapat menjelaskan isu yang dibahas peneliti.

²⁷ Chaterine Marshall dan Gretchen B.Rosman, "Designing Qualitative Research (California:sage publications",1999):150.

Langkah – langkah dalam mengolah data tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan Data.

Dalam hal ini berupa data – data mentah dari hasil penelitian seorang yang dapat berupa buku, jurnal website resmi, skripsi, situs resmi pemerintah, berita dan lainnya.

2. Reduksi Data.

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data dari hasil pengamatan serta bahan – bahan data yang ditemukan dari jurnal, skripsi dan sebagainya itu, maka data tersebut dikumpulkan dan disesuaikan mana yang perlu dan tidak perlu untuk permasalahan yang akan diteliti.

3. Operasional Data.

Setelah data telah sesuai, selanjutnya data tersebut diolah menggunakan teori dan konsep yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep perbedaan ofensif realisme dan defensif realisme untuk menjawab pertanyaan peneliti.

4. Kesimpulan atau Verifikasi.

Setelah data diolah dan telah dirangkum selanjutnya data kembali di cocokkan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.²⁸ Penulis juga menggunakan 4 perbedaan dari konsep defensif dan ofensif yang dipaparkan sebelumnya keempat perbedaan tersebut adalah:

1. Ideologi.

Perbedaan ofensif dan defensif dalam ideologi adalah, negara dengan ideologi ofensif adalah negara yang memiliki ideologi ekstrim dan intoleran,

²⁸ Ali sya' ban, " Analisis Data Kualitatif: Teknik Analisis Data Penelitian,"(2015):68.

negara seperti ini biasanya ditakuti oleh negara tetangga mereka sebab mereka memiliki rasa curiga jika negara tersebut akan memaksakan ideologinya kepada negara lain hal ini berbeda dengan negara defensif yang tidak ekstrim atau tidak anarki bagi negara defensif mereka cenderung memiliki toleransi selama negara lain tidak membahayakan negara mereka dan tidak akan menyerang negara lain atau tidak secara anarki.

2. Kebijakan Terhadap Politik Domestik.

Dalam kebijakan politik domestik negara yang defensif tidak akan ragu untuk menyerang negara lain sedangkan bagi negara defensif kebijakan politik domestik mampu memberikan pandangan jika politik domestik mampu melahirkan kebijakan yang disebabkan oleh kondisi musuh.

3. Kebijakan Terhadap Negara Tetangga yang Lemah.

Perbedaan ofensif dan defensif melihat kebijakan terhadap tetangga negara yang lemah adalah jika negara tersebut ofensif maka negara tersebut agresif dan cenderung mendominasi yang tujuannya untuk mencaplok negara yang lemah.

4. Kebijakan Militer dan Pengawasan Persenjataan.

Dalam kebijakan militer dan pengawasan persenjataan perbedaan ofensif dan defensif terletak terhadap cara pandangan negara tersebut terhadap sistem internasional, bagi negara ofensif melihat jika suatu negara saling curiga satu sama lain sedangkan negara defensif lebih melihat penyebab dari dilema keamanan itu sendiri.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB 1: Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan, tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Hubungan Bilateral Jepang dan Tiongkok Secara Historis

Bab ini memaparkan bagaimana hubungan bilateral Jepang dan Tiongkok. Paparan mengenai hubungan Jepang dan Tiongkok ini nantinya akan mempermudah penulis merunutkan kejadian – kejadian yang terjadi antara Jepang dan Tiongkok tersebut.

BAB III: Peningkatan Kapabilitas Militer Tiongkok

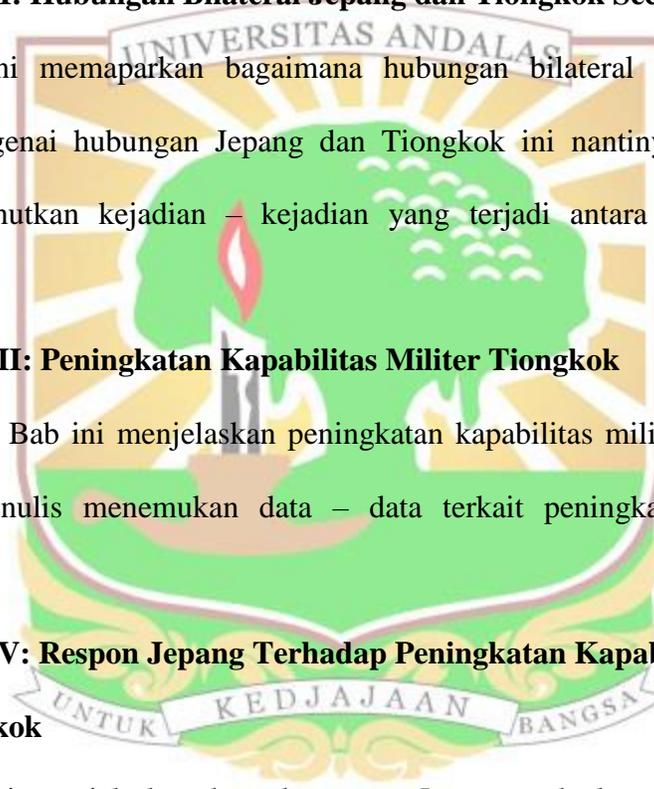
Bab ini menjelaskan peningkatan kapabilitas militer Tiongkok, dan akan membantu penulis menemukan data – data terkait peningkatan kapabilitas militer Tiongkok.

BAB IV: Respon Jepang Terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer Tiongkok

Bab ini menjelaskan bentuk respon Jepang terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok sesuai dengan konsep yang digunakan.

BAB V: Penutup

Pada bab ini akan disimpulkan dan menyatakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan.



BAB II

Hubungan Bilateral Jepang dan Tiongkok

Bab ini akan menjelaskan hubungan bilateral Jepang dan Tiongkok, dalam penjelasannya pada bab ini akan terdapat 2 sub bab yaitu: sub bab pertama akan menjelaskan hubungan bilateral Jepang dan Tiongkok secara ekonomi, dan sub bab yang kedua menjelaskan hubungan politik keamanan Jepang dan Tiongkok.

2.1 Hubungan Bilateral Ekonomi Jepang dan Tiongkok

2.1.1 Sejarah Ekonomi Jepang dan Tiongkok

Jepang dan Tiongkok adalah 2 negara dengan ekonomi terkuat di Asia Timur, pada tahun 2010 ekonomi Tiongkok menyalip ekonomi Jepang sebagai ekonomi terbesar ke – 2 dunia. Globalisasi telah mempercepat interdependensi ekonomi bagi Jepang dan Tiongkok, serta kebijakan “*One Door Policy*” Tiongkok telah memberikan keuntungan bagi Tiongkok dalam meningkatkan ekonominya. Hubungan bilateral Jepang dan Tiongkok telah terjalin sejak tahun 1972.²⁹

Pada tahun 1978 Jepang dan Tiongkok membentuk sebuah deklarasi yang bernama “Sino – Jepang” sebagai bentuk perjanjian kerjasama perdagangan jangka panjang dan untuk memperkuat hubungan kerjasama ekonomi sebab Jepang dan Tiongkok sama – sama menyadari jika keduanya memiliki tanggung jawab dalam perdamaian kawasan dan mewujudkan pembangunan kawasannya sehingga penting bagi Jepang dan Tiongkok melakukan kerjasama bidang ekonomi tahun 1990 Jepang dan Tiongkok membentuk “Diplomasi Kemitraan” untuk mempermudah kerjasama mereka.

²⁹ Amstrong Shiro, “Economic still trumps politics between Japan and china”, hal 35.

Diplomasi kemitraan ini dibentuk karena Jepang melihat jika peningkatan ekonomi Tiongkok yang telah naik 2 digit selama 5 tahun dan berhasil merubah Tiongkok dari ekonomi terbelakang menuju pabrik dunia. Kerjasama ekonomi Jepang dan Tiongkok meliputi perdagangan ekspor – impor dan investasi.³⁰

Investasi Jepang dan Tiongkok menjadi faktor kunci dalam pembuatan pabrik Jepang di Tiongkok untuk tetap kompetitif dan *offshoring* produksi Jepang ke Tiongkok di wilayah Asia Timur dan peran Tiongkok sebagai lokasi perakitan suku cadang mencakup semua komponen perdagangan menjadi pendorong utama dalam memajukan hubungan ekonomi mereka.³¹ Jepang mulai tertarik dengan sumber daya alam Tiongkok khususnya sumber daya energinya dan ingin melakukan disertifikasi impornya. Ditahun 1998 presiden Tiongkok Jiang Zemin berkunjung ke Jepang untuk memperkuat hubungan ekonomi mereka mempromosikan kerjasama ekonomi keduanya.³²

Pada tahun 1998 investasi Jepang terus mengalir di Tiongkok, dan menjadikan hubungan keduanya secara ekonomi membaik. Sejak tahun 1999 perdagangan Jepang dan Tiongkok terus meningkat dikarenakan liberalisasi ekonomi yang dilakukan Tiongkok dan pada tahun 2001 Tiongkok bergabung dengan organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organisation*) yang memperkuat posisi Tiongkok dalam bidang perdagangan, Jepang dan Tiongkok menyadari jika perdagangan potensial diantara mereka harus dikembangkan dengan kerjasama.³³

Hal ini mendorong kemajuan perdangan Jepang dan Tiongkok, ditahun 2008 Jepang dan Tiongkok menyepakati kerjasama ekonomi regional yang berpedoman pada

³⁰ Amstrong Shiro hal 18.

³¹ Amstrong Shiro hal 15.

³² Masafumi IIDA, "Japan China Relations In East Asia : Rivals or patner? hal 26.

³³ Masafumi hal 22.

keamanan dan pembangunan dunia, sejak tahun 2010 perdagangan Jepang dan Tiongkok terus mengalami peningkatan secara signifikan sehingga hari ini kerjasama Jepang dan Tiongkok berada pada posisi ke – 3 dunia.³⁴

Perdagangan Jepang dan Tiongkok telah tumbuh dan berkembang dengan cepat dari waktu ke waktu. Jepang dan Tiongkok menjadi mitra dagang yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Bagi Jepang Tiongkok adalah mitra dagang keduanya dan bagi Tiongkok Jepang adalah mitra dagang pertamanya. Berikut data perdagangan Jepang dan Tiongkok dari tahun 2011 – 2017.

Tabel 2.1 Perdagangan Jepang ke Tiongkok Tahun 2011 – 2017.

Tahun	Jumlah
2011	163,2
2012	389
2013	182,22
2014	343,7
2015	303,3
2016	456
2017	586

sumber: www.jetro.go.jp/en/report/statistic/

Data diatas menjelaskan jika peningkatan perdagangan Jepang dan Tiongkok terjadi setiap tahunnya dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan perdagangan 3 kali lipat dari tahun 2011 yang berjumlah hanya 163 menjadi 389 pada tahun 2012, dan perdagangan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu: sebesar US\$ 586. Setelah perdagangan Jepang dan Tiongkok juga menjalin kerjasama ekspor – impor. Untuk kerjasama ekspor – impor Jepang dan Tiongkok berada pada posisi ke – 3 dalam ekspor – impor Tiongkok adalah pasar yang besar bagi Jepang. Berikut data yang menunjukkan jumlah ekspor – impor Jepang dan Tiongkok.

³⁴ Muhamad Akbar Rusady, Rahmat Muhamad dan Seniwati,” Japan – Cina Relations: “ Hot Economy, Cold Politics”,International Journal Of Sosial Science and Humanity, Vol 16, No 11.

Tabel 2.2 Ekspor Jepang dan Tiongkok Tahun 2011 – 2017.

Tahun	Ekspor
2011	161.467.219
2012	144.686.177
2013	129.851.439
2014	106.128.661
2015	109.278.000
2016	129.270.688
2017	129.209.000

sumber: www.jetro.go.jp/en/report/statistic/

Data diatas menunjukkan jika ekspor Jepang naik setiap tahunnya sejak tahun 2011. Ekspor Jepang dan Tiongkok paling tinggi terjadi di tahun yang sama. Begitu juga dalam impor, Tiongkok melakukan impor ke negara Jepang dalam jumlah yang besar, berikut data impor Tiongkok ke Jepang pada tahun 2011 – 2017.

Tabel 2.3 Impor Tiongkok ke Jepang Tahun 2011 – 2017.

Tahun	Impor
2011	183.478.439
2012	189.018.794
2013	182.191.683
2014	182.191.683
2015	160.560.000
2016	145.670.688
2017	118.118.000

sumber: www.jetro.go.jp/en/statistic/

Dari data diatas dijelaskan jika sumber impor Tiongkok ke Jepang paling tinggi pada tahun 2012 yang berjumlah sebesar 189.018.794 dan paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 118.118.000. Setelah perdagangan dan ekspor impor yang besar Jepang dan Tiongkok juga melakukan investasi dalam jumlah besar, hari ini Jepang adalah lima besar investor Tiongkok. Berikut data investasi Jepang di Tiongkok dan investasi Tiongkok di Jepang.

Tabel 2.4 Data Investasi Jepang di Tiongkok Tahun 2011 – 2017.

Tahun	Jumlah
2011	12.64
2012	13.47
2013	9.10
2014	10.88
2015	10.01
2016	9.45
2017	9.679

sumber: www.jetro.go.jp/en/reports/statistic/

Data diatas menunjukkan jika investasi Tiongkok ke Jepang menurun pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Pada tahun 2015 berjumlah 10.01 sementara tahun 2016 menjadi 9.45 dan pada tahun 2017 berjumlah 9.67. Dari kelima tabel diatas telah dijelaskan jika secara ekonomi Jepang dan Tiongkok adalah 2 negara yang saling membutuhkan satu sama lain, tingginya tingkat kerjasama ekonomi Jepang dan Tiongkok pada kenyataannya tidak sebanding dengan hubungan politik dan keamanan mereka, rupanya kerjasama yang besar tidak memberi jaminan pada keduanya untuk tidak memiliki sengketa, ketegangan yang terjadi antara Jepang dan Tiongkok karena konflik sejarah serta konflik maritim yang mewarnanai hubungan politik keduanya.

2.2 Hubungan Politik dan Keamanan Jepang dan Tiongkok

2.2.1 Sejarah Hubungan Politik dan Keamanan Jepang dan Tiongkok

Jepang adalah negara yang secara geografis terdiri dari 4 pulau rumah pengunungan yaitu: Honsu, Kyushu, Shikoku dan Hokaido serta terdiri dari 680 pulau tanpa sungai internal, negara Jepang mengandalkan teknologi maritim untuk menghubungkan laut pedalaman Shito, yang memisahkan tiga pulau yaitu: Honshu, Shikoku, dan Khyusu dengan pemukiman pesisir 800km dari Tiongkok, hal ini kemudian

membuat Jepang dan Tiongkok melakukan interaksi intensif dan persamaan budaya diantara mereka.³⁵

Jika dilihat lagi hubungan Jepang dan Tiongkok menjadi unik dikarenakan kedekatan geografis, konflik historis dan kerjasama ekonomi diantara mereka. Dalam dinamikanya hubungan Jepang dan Tiongkok diwarnai oleh beberapa kali peperangan yaitu: Perang Opium 1 yang terjadi pada Tahun (1840 -1842), Perang Opium II yang terjadi pada tahun (1856 – 1860), Perang Sino – Jepang 1(1894 – 1895), Perang Sino – Jepang II (1894 – 1945).³⁶

Lee Hsein Long seorang perdana menteri Singapura mengatakan dalam perang ada 2 perbedaan pandangan antara Jepang dan Tiongkok, yaitu: Jepang tidak bisa mengingat perang sedangkan Tiongkok tidak bisa melupakan perang. Tiongkok dan Jepang telah memainkan peran mereka sebagai tetangga serumpun sejak 1980, sebagai mana dinyatakan dalam sebuah tulisan dari Iriliye yang berbunyi:

“The Chinese and the Japanese have lived as Asian neighbors for nearly two thousand years. Being geographically so close and yet psychologically quite remote their common cultural roots, the two peoples have developed since at one of commonality and disparity interdependence and autonomy, mutual respect and suspicion, attraction and repulsion, and admiration and condescension toward another.”³⁷

Akan tetapi menurut sejarah hubungan Jepang dan Tiongkok bermula saat keduanya membuka diri pada negara barat di tahun 1920, dan pada tahun 1972.³⁸ Jepang melakukan normalisasi hubungan diplomatik mereka pada tahun 1872 tepat 10 tahun normalisasi hubungan diplomatiknya, Jepang dan Tiongkok mulai menata kehidupan bertetangga dengan mencoba melupakan perang diantara mereka dan memperbaiki

³⁵ Elizabet Hubert Mallot, “ Japanese Garden “ hal 3.

³⁶ Rona Mitter,” A ‘ Slow Remembering China War Against Japan” hal 14.

³⁷ Liandgren Y.Pester dan Liandgren Yenni Wren,” Identity Politics and The East China Sea China as Japane’s other,”Asian Politics & Policy Vol 11. No 3.

³⁸ Kitaoka Shin ‘ichi,”Inception of a Modren Relaltionship, Japan – Cina Joint History Research Report: Modern and Contemporary History,” hal 13.

pandangan mereka terhadap satu sama lain, pada tahun ini juga Jepang dan Tiongkok mulai melakukan pertukaran budaya dan interaksi sebagai 2 negara yang berdekatan secara geografis. Pada tahun 1990an Jepang dan Tiongkok memperkenalkan “Deklarasi Sino Jepang” yang berorientasi pada perbaikan hubungan Jepang dan Tiongkok.

Dalam deklarasi ini Jepang dan Tiongkok berkomitmen untuk saling mengunjungi dan membuat hotline untuk memperkuat hubungan kerjasama mereka yang kemudian pada tahun 1999 perdana menteri Jepang Keizo Obuchi mengunjungi Tiongkok dibalas dengan kunjungan perdana menteri Tiongkok Zhu Rongji pada tahun 2000, akan tetapi hal itu berubah pada tahun 2001 hubungan Jepang dan Tiongkok kembali memburuk.

2.2.2 Hubungan Jepang dan Tiongkok Masa Sengketa Kuil Yakusuni (2001 – 2006)

Pada tahun 2001 perdana menteri Jepang Junichi Koizumi membuat hubungan Jepang dan Tiongkok memburuk dikarenakan beberapa insiden terjadi mewarnai kepemimpinannya Koizumi ini, pertama Koizumi mengunjungi kuil Yakusuni tahun 2001, dan ditahun yang sama juga Koizumi mengunjungi monumen perang Jepang di sebuah museum Yushukan.³⁹

Dalam museum tersebut diperlihatkan gambar tentang Jepang sebagai korban perang, dan beberapa gambar tentang pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki, dalam monumen tersebut diperlihatkan sebuah film berdurasi 50 menit tentang pemaksaan Jepang untuk pergi berperang oleh embargo Amerika untuk mundur dari Tiongkok, Jepang juga menyangkal pembantaian Nanjing pada 1937.⁴⁰ Tindakan Koizumi ini kemudian dianggap

³⁹ Desker Bary, "Yakusuni Shrine and Museum Japan's WW2 Responsibility. <http://www.ns-edu.sg/wp-content/uploads/2014/11/10/42>. (Diakses pada 1 September 2018).

⁴⁰ Desker Bary hal 32.

sebagai perusak landasan politik Tiongkok dan Jepang oleh Li Zhaoxing menteri luar negeri Tiongkok. Hal ini membuat pemerintah Tiongkok marah dan tidak lagi berkunjung ke Jepang.

Sejak kepemimpinan Koizumi tidak ada kunjungan pemerintah Tiongkok ke negara Jepang. Pada tahun 2004 kerusuhan anti Jepang terjadi setelah pertandingan sepak bola antara Jepang dan Tiongkok di piala Asia AFC, ditahun 2005 gerakan anti Jepang di kota – kota besar Tiongkok mendorong sikap keras Tiongkok ke Jepang masyarakat Tiongkok melakukan demo anti – Jepang.⁴¹

Demo anti Jepang diikuti penghancuran perusahaan Jepang dikarenakan Jepang menerbitkan buku sejarah perang Nanjing hal ini membuat masyarakat Tiongkok marah dan berdampak pada penentangan Tiongkok untuk Jepang mendapatkan kursi di dewan keamanan PBB.⁴² Ini adalah pembekuan hubungan Jepang dan Tiongkok yang terjadi secara mendalam di tahun 2006 masyarakat dan pemerintah Tiongkok marah terhadap tindakan Koizumi karena sudah 6 kali Koizumi melakukan kunjungan ke kuil Yakusuni.

2.2.3 Normalisasi Hubungan Jepang Pada Masa Pemerintah Shinzo Abe (2007 – 2010).

Setelah perdana menteri Koizumi digantikan oleh perdana menteri Shinzo Abe hubungan Jepang dan Tiongkok kembali membaik, karena pada tahun 2007 Abe memilih mengunjungi Tiongkok sebagai kunjungan kenegaraannya untuk pertama kali, kunjungan Abe ini dijadikan sebagai promosi pertukaran pembangunan bilateral yang menguntungkan

⁴¹ A Irfan, hal 12.

⁴² Van Kemenade Willem, "China and Japan: Pathner or Permanent Rival", <https://peacepalaselibrary>.

bagi keduanya, dan kunjungan ini dibalas dengan kunjungan perdana menteri Tiongkok Wen Jiabao ke Jepang pada tahun yang sama.⁴³

Setelah menjabat sebagai perdana menteri Abe mampu mengembalikan hubungan Jepang dan Tiongkok kembali normal. Ditahun 2008 pada tanggal 7 Mei presiden Tiongkok Hu Jintai melakukan kunjungan resmi ke Jepang dan menandatangani pernyataan kerjasama “hubungan bersama yang bermanfaat atas dasar kepentingan umum” hubungan ini didasarkan pada hubungan kerjasama perdamaian dan pertemanan. Namun disisi lain 2 tahun kemudian yaitu: pada tahun 2010 muncul sengketa teritorial dan batas maritim yang membuat ketegangan diantara Jepang dan Tiongkok tentang klaim pulau tak berpenghuni Senkaku (Jepang) dan Diayou (Tiongkok) pulau ini menjadi sengketa antara Jepang dan Tiongkok karena ditemukannya potensi gas bumi berupa hidrokarbon yang membuat Tiongkok ingin memilikinya sementara menurut hukum internasional pulau ini masuk wilayah teritorial Jepang.⁴⁴

Ditahun ini juga konflik di wilayah maritim bermula antara Tiongkok dan Jepang, berawal dari sebuah kapal pukat pencuri ikan Tiongkok yang bertabrakan dengan kapal patroli *Japan Coast Guard* atau sering disebut JCG yang berakibat pada penangkapan kapten kapal Tiongkok, insiden ini menjadi insiden pertama yang kemudian mengundang konflik di maritim pada tahun – tahun berikutnya.⁴⁵

2.2.4 Sengketa Laut Timur Pada 2011 – 2017.

Tahun 2011 hingga 2017 adalah tahun dimana Jepang dan Tiongkok mulai memperlihatkan konflik di maritim mereka secara terang – terangan karena insiden –

⁴³ Shoji Tamoka, ”Japan Security Outlook: Security Challenges and the New National Defense Studies”,(NIDS).

⁴⁴ Ming Wang, ”Japan’s Party Politics and China Policy: The inceden”, Chinese Fishing Boat Collision hal 13.

⁴⁵ Chico Harlan and Jia Yang, ”Cina Patrol Ships To Contested Island after Buys Them,”The Washington post September 12.2012.

insiden beruntun menuju konflik telah terjadi sepanjang tahun 2011 – 2017.⁴⁶ Tahun 2011 – 2017 hubungan Jepang dan Tiongkok diwarnai sengketa Laut Tiongkok Timur, Laut Tiongkok Timur adalah lautan air tertutup yang dikelilingi oleh Taiwan, Jepang, Korea dan juga Tiongkok. Sumber daya yang terkandung di Laut Tiongkok Timur membuat persengketaan antara Jepang dan Tiongkok. Dari tahun 2011 hingga 2017 konflik Laut Tiongkok Timur menjadi sengketa yang tidak berkesudahan antara keduanya bermula dari tahun 2012.

Ditahun 2012 sebuah kapal pengintai Tiongkok menembus ruang udara Jepang, kemudian seorang *frigate* Tiongkok mengunci radar tembaknya pada perusak kelas *murasami*, serbuan maritim Tiongkok ke perairan teritorial Jepang dan kegiatan survei maritim Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang tindakan Tiongkok ini dibalas Jepang pembelian 3 pulau tak berpenghuni dari pihak swasta yaitu: Pulau Outsima, Pulau Kotajojima, Pulau Minakojima yang membuat Tiongkok marah sebab Tiongkok menilai jika pembelian ketiga pulau tersebut hanya sepihak, pembelian pulau ini disusul oleh aksi demo anti Jepang di Tiongkok yang berujung pada perusakan dan kekerasan terhadap warga Jepang, dan ditahun yang sama pesawat Tiongkok telah aktif di wilayah pulau dan melanggar wilayah ruang Jepang dan menyusup pada perairan teritorial Jepang.

Memasuki tahun 2013 ketegangan di wilayah maritim masih terjadi tahun ini Tiongkok sering mengirim kapal patroli (*Haijian*) dan kapal penangkap ikan (*Yuzheng*) dari lembaga maritimnya Jepang melaporkan bahwa telah ada 415 kasus pelanggaran udara yang dilakukan Tiongkok, dan 188 kasus kapal dimana kapal – kapal Tiongkok masuk perairan Jepang dan melatih radar pengendali api pada negara Jepang.

⁴⁶ A. Irfan, hal 12.

Kemarahan Jepang atas kejadian ini dinyatakan dalam pernyataan menteri pertahanan Jepang saat itu yang bernama Itsunori Onedera menyatakan jika perilaku Tiongkok telah merujuk pada ancaman militer menurut piagam PBB.⁴⁷ Bulan Juli 2013, jet JASDF mengkonfirmasi jika pesawat peringatan dini Tiongkok berada di kepulauan Senkaku/ Diayou, pada September 2013 terjadi peledakan bom diperairan antara Okinawa dan pulau Miyakojima, dibulan Oktober Tiongkok dilaporkann telah melakukan “Manuver Lima” dibarat Samudra Pasifik.⁴⁸

Kemarahan Jepang memuncak pada saat Tiongkok membangun zona identifikasi di tanggal 23 November 2013 yang memiliki aturan sebagai berikut: semua pesawat yang melintasi ADIZ Laut Tiongkok Timur harus tunduk kepada pemerintah Tiongkok atau menaati perintah komando pertahanan udara Tiongkok, dan Kementerian Pertahanan Tiongkok adalah institusi yang bertanggung jawaab atas operasional dan pembuatan peraturan ADIZ.

ADIZ Tiongkok mencakup area kepulauan Senkaku/Diayou yang masih disengketakan dengan Jepang dan mencaplok sebagian wilayah teritorial Jepang, ADIZ Tiongkok berhimpitan dengan ADIZ Jepang sehingga Tiongkok mengerahkan kekuatan *People's Liberation Army* (PLA) untuk kawasan tersebut, pengerahan kekuatan ini dibawah peningkatan anggaran militer Tiongkok sehingga PLA meningkatkan kekuatannya secara serius.

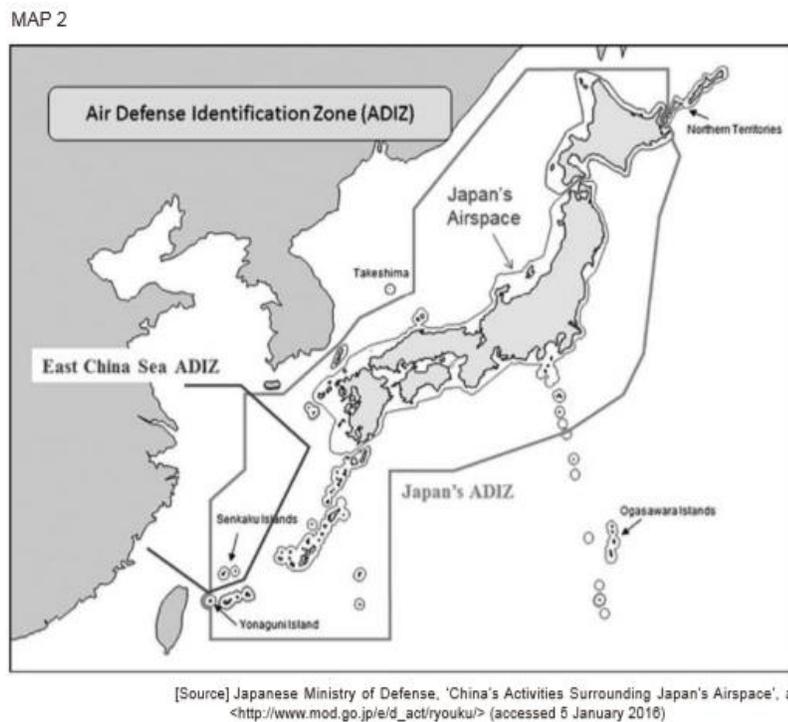
Setelah pendirian ADIZ oleh Tiongkok, Jepang memberikan instruksi kepada maskapai penerbangan mereka untuk tidak mematuhi zona ADIZ Tiongkok, selain itu Jepang juga melaporkan hal ini ke (*International Civil Aviation Organization*) ICAO dan

⁴⁷ Sakaki Alexandra,” Japan Sakaki Policy: A Shif in Direction Under Abe”, hal 6.

⁴⁸ Sakaki Alexandra hal 5.

meminta pada ICAO untuk memeriksa tindakan Tiongkok tersebut apakah tindakan Tiongkok berbahaya pada keamanan Jepang dikarenakan bagi Jepang ADIZ Tiongkok tidak valid, di tanggal 23 November 2013, (*Chenese Maritime Surveillance*) CMS dan (*Fishery Laws Enforcement Command*) FLEC juga meningkatkan kehadirannya disekitar perairan wilayah Jepang.

Berikut dapat dilihat gambar zona ADIZ Tiongkok.



2.6 Gambar Air Defense Identification Zone (ADIZ) Tiongkok

Dari gambar diatas terlihat jika ADIZ Tiongkok berhimpitan dengan ADIZ Jepang dalam ADIZ ini Tiongkok mengutamakan penggunaan *People's Liberation Army Navy* (PLAN) dan *People's Liberation Army Air Force* (PLAAF) untuk melindungi kawasan perairannya. Tiongkok menyatakan dengan tegas bahwa negaranya ingin menjadi

“Negara Maritim” sehingga PLAN dapat mengamankan hal dan kepentingannya dimaritim sejalan dengan misi “*Protection Open Seas*” terutama di Laut Timur. Selain menjadi negara dengan kekuatan maritim, Tiongkok juga berkeinginan untuk menjadi penjelajah lautan dengan meningkatkan kekuatan PLAN dan *Green Water Navy* atau *Coastal Defense* pertahanan pesisir ke *Blue Water Navy* Asia Timur.⁴⁹

Operasi Blue Water Navy ini merupakan bentuk penegakan kedaulatan dan usaha perlindungan maritim. Bagi ahli keamanan Jepang Tiongkok dinilai melakukan taktik salami “*Salami Senjutsu*” yang artinya Tiongkok berangsur – angsur memperluas dan mengkonsolidasikan kontrol sengketa, keadaan ini membuat Jepang menyetujui pembaruan Panduan Program Pertahanan Nasional (NDPG). NDPG tersebut menekankan peningkatan situasi “zona abu – abu” dan berbagai isu wilayah dan kedaulatan.

Tindakan Tiongkok di perairan Jepang saat ini sangat mempengaruhi peran (*Maritime Self Defense Force*) MSDF untuk membela Jepang dari invansi maritim Tiongkok dan mengamankan keselamatan lalu lintas Jepang serta Pasukan Bela Diri Jepang (*Ground Self Defense Force*) GSDF akan melanjutkan pembangunan brigade amfibi di sekitar Resimen Infanteri Darat.

Jepang juga meningkatkan kelompok pasukan operasi khususnya, untuk memperkuat pengawasannya, skuadron peringatan radar darat ditingkatkan dari delapan menjadi dua puluh delapan, Jepang juga membentuk badan koordinasi kebijakan pintu baru seperti keamanan AS. Memasuki tahun 2014 kemerosotan hubungan Jepang dan Tiongkok disebabkan pernyataan perdana menteri Jepang Shinzo Abe yang menyatakan jika kebijakan luar negeri Tiongkok terkait peningkatan militernya khususnya laut telah

⁴⁹ Matheiu Duehatel, hal 1.

memprihatinkan masyarakat internasional khususnya Jepang. Jepang dan Tiongkok saling tuduh menuduh satu sama lain sebagai ancaman di kawasan Asia Timur.⁵⁰

Tahun ini Abe menyatakan jika ada penafsiran kembali terkait pasal 9 dari konstitusi cinta damai Jepang yang melarang penggunaan perang dan pemeliharaan potensi perang. Dalam penafsiran yang baru pasukan bela diri Jepang pada tahun 2014 akan melakukan latihan militer dan fokus pada maritimnya. Di bulan September 2014 Jepang mengumumkan anggaran pertahanan Jepang mencapai US\$ 49 miliar.⁵¹



⁵⁰ Benoit Hardy – Chartand,” Misperception, Threat, Cina – Japan Relations ,”GIGI paper no 107
<http://www.cigionline.org/cities/default/file/cigi- paper No.107>.

⁵¹ Japan Ministry of Defense,” Japan’s White Defense Paper,” 2015.[www.mod go.jp](http://www.mod.go.jp).

BAB III

Peningkatan Kapabilitas Militer Tiongkok

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai peningkatan kapabilitas militer Tiongkok, dalam penjelasannya penulis akan menjelaskan sejarah peningkatan militer Tiongkok, anggaran militer Tiongkok dan peningkatan senjata personel militernya.

3.1 Sejarah Peningkatan Kapabilitas Militer Tiongkok.

Militer adalah ukuran utama kekuatan negara, sebab negara hidup dalam keadaan terancam dimana ancaman selalu ada baik dalam internal maupun eksternal. Peter Paret mengungkapkan jika militer adalah "ungkapan dan implimentasi kekuatan negara dalam berbagai cara dan melampaui batas – batas negara dan merupakan instrumen dengan kekuatan politik yang dibuat secara permanen."⁵²

Sejarah peneingkatan militer Tiongkok bermula sejak terbentuknya Republik rakyat Tiongkok pada tahun 1949, kemudian pemerintah mengambil 3 langkah utama terhadap keamanan negara Tiongkok yaitu:

1. Tahun 1960 hubungan Sino – Soviet memburuk, disusul perang Vietnam yang meningkat membuat lingkungan keamanan Tiongkok semakin memburuk dan adanya ancaman terhadap kecaman nasionalnya sehingga perhatian Tiongkok mulai berpusat pada militernya.
2. Pada sidang pleno ketiga Komite Sentral ke – 11 Partai Komunis China (PKC) yang diadakan di Beijing pada Desember 1978 diakui sebagai titik awal untuk periode sejarah reformasi dan membuka perubahan secara terang – terangan dalam 2 dekade berikutnya Tiongkok berupaya menjadikan ekonomi sebagai pilar pertamanya dan militer sebagai

⁵² Claude, France Arnold dan Yan Briand." Military capability development in the framewrok the cammon security and defense police"Cyprus presidency, of the Council of the EU 2012.

pilar keduanya. Tiongkok menikmati peningkatan ekonomi yang luar biasa dengan tingkat pertumbuhan rata – rata 6,5 % pada tahun 1977, GDP Tiongkok mencapai US\$ 902 miliar dolar dan menjadi peringkat ke tujuh dunia. Pada tahun 2010 posisi Tiongkok berubah pada peringkat ke – dua dunia ini adalah kebangkitan ekonomi yang kemudian menyusul peningkatan kekuatan militer Tiongkok.⁵³

Lompatan ekonomi Tiongkok semakin terasa dari tahun – ke tahun.⁵⁴ Pemerintah secara sistematis dan konsisten mempertahankan program pembaruan dalam bidang ekonomi. Otoritas bidang ekonomi terus menggerakkan perubahan, tanpa perlu larut dalam retrorika. Dengan melewati sejarah yang panjang selama beberapa waktu, tersebut ternyata telah memberikan dampak positif bagi kelangsungan perekonomian Tiongkok. Kekuatan pasar dalam negeri yang begitu besar merupakan salah satu sumber kekuatan ekonominya. Sehingga menjadikan Tiongkok tetap yakin dan optimis terhadap perbaikan militernya.

Dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun sejak Tiongkok membuka diri terhadap pasar pada tahun 1979, Tiongkok telah berupaya untuk membangun kekuatan angkatan bersenjata dalam negeri yang kuat yang selaras dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Tiongkok. Untuk itu peningkatan anggaran pertahanan dan anggaran bersenjata Tiongkok selalu dipertahankan pada tingkat yang wajar dan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1987, Tiongkok sampai tahun 1987, Tiongkok memfokuskan diri terhadap pembangunan ekonomi memberikan porsi anggaran yang kecil terhadap bidang pertahanan dan keamanan.

⁵³ Zang Heng, "Characteristic of Chinese Military Culture: A Historical Perspective," isdpc.eu/content/uploads/publication/2015-heng-Chinese-military-culture. (Diakses pada 1 November 2018).

⁵⁴ Elizabeth Perry & Cristine Wong, "The Political Economy of Reform in post China" (Harvard University Press 1985) hal 19

3. Pada dekade pertama abad ke – 21, Tiongkok terus berkomitmen dalam pengembangan kekuatan ekonomi dan militer menjadi setara, dalam laporan ke – enam belas Kongres Nasional Partai pada November 2002, sekretaris Jendral Jiang Zemin menyatakan bahwa:

“we must upload the principle of coordinated developmet of national defense and economy and push the modernization of national defense and the army on the basis of economy growt”.

Hal ini kemudian menjadi penanda keseriusan Tiongkok dalam melakukan perubahan terhadap militernya. Selama dekade terakhir Tiongkok terus mengalami ekspansi ekonomi yang cepat dan berhasil meningkatkan pertumbuhan tahunan sebesar 10,5%. PDB dan volume perdagangannya naik dari posisi keenam dan ketujuh menjadi peringkat kedua. Atas dasar perkembangan ekonomi yang stabil, dan cepat serta pertumbuhan ekonomi yang tajam. Angkatan bersenjata Tiongkok mengalami peningkatan anggaran sebesar 2 digit. Keseriusan Tiongkok dalam membangun kekuatan militernya diperkuat lagi dengan pernyataan presiden Tiongkok yaitu Hu Jintao yang berbunyi:

“ To strenghten national defense and the armed force accupis an important place in the overall arrangements for the cause socialism with chinese characteristics. Bearing in mind economic and national security and development, into consideration and make our country prosperous and our armed forces powerful while building a moderately prosperous societi in all respects.”⁵⁵

Tiongkok terus menekankan bahwa kekuatan ekonomi dan kekuatan militer harus dikembangkan secara seimbang untuk mencapai tujuan terpadu dalam menciptakan bangsa sejahtera dan kekuatan bersenjata Tiongkok terus mengeksplorasi jalur pembangunan yang menampilkan integritas militernya. Kondisi ini memberikan kesempatan pada Tiongkok untuk melakukan modernisasi pada militernya yang terus – menerus mengalami peningkatan yang tajam. Modernisasi militer Tiongkok ini dilakukan dengan peningkatan

⁵⁵ China’s Military Modernization, Peterson Institute For International Economics www.petersonintitute.org (Diases pada 2 Septermber 2019).

dibeberapa bidang seperti: anggaran militer, peningkatan jumlah personel militernya dan modernisasi pada *People's Liberation Army* dalam kekuatan (darat, laut dan udara).

3.1.2 Indikator Peningkatan Kapabilitas Militer Tiongkok

Indikator dalam peningkatan militer Tiongkok adalah data – data ekonomi pertahanan, data industri pertahanan, serta data sumber daya manusia dan pasukan. Secara umum pemaparan data – data agregat yang diolah dari *The Military Balance, China Defense White Paper*, dan *Annual Report To Congress Military and Security Developments Involving the people's Republic of China*, serta data – data pendukung dari berbagai sumber.⁵⁶

3.1.3 Peningkatan Anggaran Militer Tiongkok

Sebuah negara yang melakukan perbaikan dalam sektor militernya indikator pertamanya dilihat dari anggaran militernya. Hal ini karena identifikasi awal terhadap peningkatan militer suatu negara adalah indikator yang menjadi acuan keamanan suatu negara, serta sebagai informasi untuk biaya keamanan suatu negara.

Sadar jika anggaran militer adalah tahap awal dari pembangunan militernya sejak tahun 2010 dan peningkatannya terus berada diangka 2 digit, yang artinya peningkatan anggaran militer Tiongkok selalu berada di atas 10 % pertahunnya.⁵⁷ Tiongkok menyadari jika negaranya adalah negara yang berbatasan dengan beberapa negara di Asia Timur dan konflik wilayah yang akan muncul membuat Tiongkok merasa jika peningkatan militer menjadi kebutuhan bagi keamanannya sehingga secara konsisten setiap tahun anggaran

⁵⁶ Center for National Defense Policy, *Strategic Review:2012*,(Beijing:Academy of Military Science, April 2013), hal 25 – 26. dalam Daniel Hatnett, *Air Sea Battle, China and the U.S Relabalance to Asia*, (Center For National Policy:2013), hal 5.

⁵⁷ Sing Manjit ,”China’s Ever Increasing Defense Budget,” <http://www.claws.in/image.journals - doc/678778025> Manjit - Singh (Diakses pada 3 September 2018).

militer Tiongkok mengalami peningkatan, hal ini kemudian membawa Tiongkok sebagai negara dengan anggaran belanja militer ke – dua dunia.

Negara Tiongkok memiliki ambisi untuk keamanan mereka dengan melestarikan sistem politik dasar Tiongkok dan keamanan nasional, melindungi kedaulatan nasional integritas teritorial, dan persatuan nasional pembangunan dan untuk mempertahankan kondisi internasional untuk pengembangan ekonomi Tiongkok.⁵⁸ Berikut tabel 15 besar negara dengan belanja militer tertinggi dunia.



Tabel 3.1.15 Besar Negara Dengan Belanja Militer Tertinggi Dunia.

Rank		Country	Spending, 2017 (\$ b.)	Change, 2008-17 (%)	World share, 2017 (%)	Spending as a share of GDP (%) ^b	
2017	2016 ^a					2017	2008
1	1	USA	610	-14	35	3.1	4.2
2	2	China	[228]	110	[13]	[1.9]	[1.9]
3	4	Saudi Arabia	[69.4]	34	[4.0]	[10]	7.4
4	3	Russia	66.3	36	3.8	4.3	3.3
5	6	India	63.9	45	3.7	2.5	2.6
6	5	France	57.8	5.1	3.3	2.3	2.3
7	7	UK	47.2	-15	2.7	1.8	2.3
8	8	Japan	45.4	4.4	2.6	0.9	0.9
9	9	Germany	44.3	8.8	2.5	1.2	1.3
10	10	South Korea	39.2	29	2.3	2.6	2.6
11	13	Brazil	29.3	21	1.7	1.4	1.4
12	11	Italy	29.2	-17	1.7	1.5	1.7
13	12	Australia	27.5	33	1.6	2.0	1.8
14	14	Canada	20.6	13	1.2	1.3	1.2
15	15	Turkey	18.2	46	1.0	2.2	2.2
Total top 15			1 396	..	80
World total			1 739	9.8	100	2.2	2.4

[] = SIPRI estimate; GDP = gross domestic product.

⁵⁸Chan Artur, Cooper A Cortez, Stokes Mark dan Easton Ian, "Transformation of Taiwan 's Reserve Forse," <http://ww.rand.org> (Diakses pada 14 September 2018).

Dari tabel diatas terlihat jika Tiongkok menjadi negara kedua setelah USA, dalam belanja militernya, Tiongkok bahkan mengalahkan Rusia dan India yang menjadi pemboros belanja militer ditahun sebelumnya.⁵⁹ Besarnya anggaran militer Tiongkok di pengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negaranya, dengan dukungan pertumbuhan serta posisi negara Tiongkok yang sedang dalam fase *rising power* membuat anggaran militer Tiongkok meningkat setiap tahunnya.

Dari tahun 2010 Tiongkok mulai membuka diri dengan perkembangan GDP 10% setiap tahunnya dan berdampak terhadap peningkatan anggaran militer negara Tiongkok, dengan dukungan pertumbuhan serta posisi negara Tiongkok yang sedang dalam fase *rising power* membuat anggaran militer Tiongkok meningkat setiap tahunnya. Perkembangan GDP tersebut menjadi sumber dana dari anggaran militer negara Tiongkok. Dibawah ini data tentang estimasi IMF atas GDP negara Tiongkok.

Tabel 3.2 Estimasi IMF atas GDP Tiongkok Tahun 2011 – 2017.

Tahun	Total GDP Tiongkok
2011	7,314.48
2012	8,186.68
2013	9,469.13
2014	10,211.93
2016	11,968.41
2017	12,864.40

Sumber: Anthony H.Codesman and Steven Colley, *Chinese and Military Modernizationin 2015: A Comparative Analysis*, Center For Strategis and International Studies (CSIS), 2015 hal 63.

Data diatas menjelaskan bahwa sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang besar, Tiongkok memiliki sumber daya yang besar untuk digunakan dalam alokasi investasi militernya, dan kemudian berpengaruh terhadap peningkatan anggaran militer negara Tiongkok.

⁵⁹ <https://www.SIPRI.org> (Diakses 1 Oktober 2018).

Pada tahun 2010 peningkatan anggaran militer Tiongkok berjumlah US\$ 81,3 miliar kemudian mengalami peningkatan 12,7 tahun 2011 berjumlah US\$ 91,5 miliar, yang diumumkan pada tanggal 4 Maret 2011. Pada 13 Februari Tiongkok mengumumkan peningkatan anggaran militer pada 2012 sebanyak 23% yaitu US\$ 114 miliar, sedangkan pada 5 Maret 2013 Tiongkok mengumumkan kembali peningkatan 10% dari 2012 berjumlah US\$ 124 miliar.⁶⁰

Pada 5 Maret Tiongkok mengumumkan bahwa anggaran militernya meningkat 12,2 % sebanyak US\$ 132 miliar.⁶¹ Pada 4 Maret 2015 Tiongkok mengumumkan anggaran militernya naik 10% berjumlah US\$145 miliar.⁶² Pada 5 Februari 2016 Tiongkok mengumumkan peningkatan anggaran militernya naik 10% dari 2015 berjumlah US\$ 150 miliar.⁶³ Pada 4 Maret 2017 Tiongkok mengumumkan anggaran militer Tiongkok mengalami peningkatan 10% atau berjumlah US\$ 164.60 miliar.⁶⁴

Dalam peningkatan anggaran ini Tiongkok semakin agresif dalam membelanjakan anggarannya terhadap pertahanann Tiongkok dengan biaya belanja militer yang tidak sedikit setiap tahunnya. Meskipun peningkatan kapabilitas militer Tiongkok dilakukan dibidang lain tetapi keseriusan dalam anggaran belanja militer Tiongkok membuat negara tetangga Tiongkok selalu merasa berada pada keadaan yang membuat mereka tidak aman. Keseriusan Tiongkok dalam membelanjakan anggaran militer untuk memperbaiki militernya yang semakin terlihat dari jumlah anggaran yang selalu berada pada angka yang besar.

⁶⁰ Dadang Sobar Wiranata, hal 25.

⁶¹ Japan's Ministry of Defense," Japan's White Defense Paper,"2015 www.mod.go.jp.

⁶² Japan 's Ministry of Defense,"Japan's White Defense Paper,"2016 www.mod.go.jp.

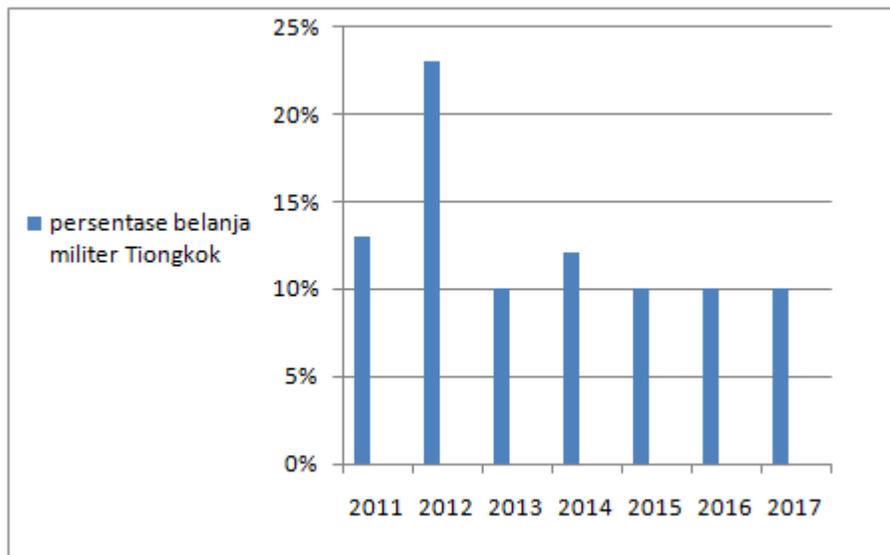
⁶³ Japan's Ministry of Defense," Japan 's White Defense Paper,"2016 www.mod.go.jp.

⁶⁴ Japan's Ministry of Defense," Japan's White Defense Paper,"2017 www.mod.go.jp.

Bagi negara Tiongkok penegeluaran yang besar terhadap belanja militernya bukanlah hal yang memberatkan negaranya sebab negara ini memiliki ambisi yang besar terhadap perbaikan militernya. Sebagai negara yang luas dan memiliki jumlah penduduk yang tinggi negara inipun memiliki kesempatan untuk meningkatkan anggarannya militernya.

Peningkatan anggaran militer yang besar tersebut terlihat sejak tahun 2010 hingga 2017, ditahun ini pula muncul beberapa konflik besar yang terjadi diantara Jepang dan Tiongkok. Meskipun keduanya saling curiga satu sama lain terhadap tindakan – tindakan yang memicu militer. Sebagai negara tetangga yang berdekatan hubungan Jepang dan Tiongkok saat ini memasuki fase yang rumit bagi keduanya. Jepang merasa jika sebenarnya Tiongkok belum perlu untuk meningkatkan anggaran pertahanannya sebesar belanja militernya sekarang. Arus peningkatan anggaran militer Tiongkok dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

3.3 Gambar Peningkatan Anggaran Militer Tiongkok 2011 – 2017.



Sumber: Buku Putih pertahanan Tiongkok tahun 2011 – 2017.

Data diatas telah menjelaskan peningkatan anggaran militer Tiongkok yang terus mengalami peningkatan, dan peningkatan tertinggi pada tahun 2012. Pada tahun 2015,2016 dan 2017 kenaikan anggaran militer Tiongkok sama tetapi kenaikan anggaran militer selalu berada pada posisi 10 %.

Anggaran militer Tiongkok ini digunakan untuk tiga jenis pengeluaran utama yaitu: (1) *personnel*, (2) *Training and Maintainance*, dan (3) *Equitment*. Biaya personel (*Personnel expenses*) digunakan untuk pembayaran gaji rutin, tunjangan perumahan, asuransi pangan, serta pakaian dan kebutuhan harian seluruh personel PLA, baik militer maupun sipil. Untuk biaya pelatihan dan perawatan (*training and maintainance expenses*) mencakup biaya pelatihan pasukan, pendidikan di dalam institusi, operasional dan lembaga, pemeliharaan instalasi dan fasilitas PLA, serta baiay rutin operasional.⁶⁵

Sedangkan peralatan (*equitment expenses*) mencakup anggaran penelitian dan pengembangan, eksperimen, pengadaan dan perawatan serta biaya transportasi dan inventori persenjataan PLA. Keseluruhan anggaran tersebut mencakup biaya pasukan aktif, pasukan cadangan, maupun misil serta pembiayaan keluarga (pasangan dan anak dari personil PLA). Anggaran ini juga mencakup biaya pembangunan ekonomi dan sosial, baik ditingkat lokal maupun nasional.

3.1.4 Peningkatan Personel Militer

Negara Tiongkok merupakan negara dengan instrumen partai komunis yang disebut dengan *China's Comunist Party* (CCP). Militer Tiongkok secara resmi disebut dengan Tentara Pembebasan Rakyat atau *People's Liberation Army* (PLA). Angkatan militer Tiongkok terdiri dari *People's Liberation Army* (PLA), *People 's Armed Police*

⁶⁵ China's National Defense in 2010,"In formation Office of the State Council The People's Republic of China " Beijing, March 2011) hal 32- 34.

Force (PAP), dan pasukan wajib militer. PLA ini terbagi dalam 4 bagian yaitu: darat, laut, udara dan pasukan misil serta pasukan pendukung strategis dan pengembangan setiap tahunnya sejak 2011, 2013, 2015, 2016. Berikut jumlah pasukan dan kekuatan PLA Tiongkok.

3.4 Tabel Pasukan Tiongkok Tahun 2011,2013, 2015, dan 2016.

Year		2011	2013	2015	2016
Total military Forces		Approx 2.3 million troops	Approx 2.3 million troops	Approx 2.3 million troops	Approx 2.3 million troops
Ground Force	Group Troops	Approx 1.6 million troops	Approx 1.3 million troops	Approx 1.6 million troops	Approx 1.6 million troops
	Tanks	Type 98 A, Type 96, Type 88 A/B and others, approx 7.550 vehicles	Type 98A/99, Type 96A, Type 88 A/B and others, approx 8,200 vehicles	Type99 /A, Type 98/A, Type 88 A/B and others, approx. 7,300 vehicles	Type 99/A, Type 98/A, Type 96/A, Type 88A/B and other, approx 7,200vehicles
Maritime forces	Warships	Approx 950 vessels/1.341 millions tons	Approx 9670 vessels/1.469 millions tons	Approx 870 vessels/ 1.470.millions tons	Approx 880 vessels/1.502 millions tons
	Destroyer & Frigate	Approx 75 vessels	Approx 80 vessels	Approx 70 vessels	Approx 70 vessels
	Submarines	Approx 60 vessels	Aprox 60 vessels	Approx 60 vessels	Approx 60 vessels
	Marines	Approx 10.000 toops	Approx 10.000 troops	Approx 10.000 troops	Approx 10.000 troops
Air Force	Combat Airacraf	Approx 2,040 Airacraf	Approx 2,580 Airacraf	Approx 2,620 Airacraf	Approx 2,720 Airacraf
	Modren Figher Airacraf	J – 10 x 144 Su – 27 x 194 Su – 30 x 97 (fourt Generation Figthers 4435 total aircraft	J – 10 x 268 Su – 27 /J 11x 303 Su – 30 x 97 (fourt Generation Figthers total 673)	J – 10 x 294 Su – 27/J – 11 x 340 Su – 30 x 97 (fourth Generation Fighters total 731	J – 10 x 347 Su – 27/J x 352 Su – 30 x 97 J – 15 x 14 (fourt Generation Figthers total 810
Referense	Population	Approx 1,354 billion	Approx 1.347 billion	Approx 1.370 billion	Approx 1.71 billion

Terms of Servise	2 years	2 years	2 years	2 years
------------------	---------	---------	---------	---------

Sumber: diolah dari *Japan white Paper 2012, white paper 2014, White paper 2016, Japan white paper 2017.*

Data diatas telah menjelaskan peningkatan kekuatan PLA Tiongkok yang mengalami peningkatan dari tahun 2011, tahun 2013, tahun 2015 dan 2016. Menurut *Global Fire Power* pada tahun 2013 Tiongkok memiliki total *Manpower Available* adalah 749.610.775 dengan *Fit For Military Services* 618.588.62, *Active Military Personel* 2.285.000 dan *Active Military Reserves* 2.300.000.⁶⁶ Sedangkan pada tahun 2017 *Manpower Available* menjadi 750.000.000, *Fit For Services* 619.000.000, *Active Military Reserves* 2.130.000, *Active Military Personel* 2.694.300. Dalam Buku Putih pertahanannya Tiongkok juga menunjukkan perubahan armada militer atau “*Revolution in Military Affair* (RMA)”. Ini adalah bentuk penegasan jika Tiongkok akan memperkuat persenjataan militernya seiring dengan kondisi yang terjadi saat ini.⁶⁷

3.1.5 Perkembangan Industri Pertahanan

Industri pertahanan Tiongkok mulai dibangun pada tahun 1950an dengan model pembangunan dibantu Uni Soviet. Di era reformasi Tiongkok tahun 1970an, industri pertahanan milik negara seperti *6th Machine Building Industry*, dan *Cina State Shipbuilding Corporation* di tahun 1982. Ditahun 1992, sebagian besar industri pertahanan seperti *Aviation Industries of Cina* dan *Cina Aerospace Corporation* (yang mengembangkan misil dan sistem luar angkasa), *Northern Chinese Industries Corporation* (mengembangkan dan memproduksi persenjataan khususnya bagi kebutuhan angkatan darat), dan *Cina National Nuclear Corporation* (memproduksi tenaga nuklir bagi kebutuhan sipil dan militer) telah menjadi perusahaan milik negara.

⁶⁶ <https://www.globalfire.power.com/country-military-strength-detail.asp?country-id>.

⁶⁷ Ian E Rinehart, hal 25.

Beberapa perusahaan diawasi secara ketat dan langsung oleh pemerintah diantaranya *China's Nuclear Weapons Complex* yang berada di bawah pengawasan kementerian Industri Elektronika. Di tahun 1999 hampir seluruh industri pertahanan Tiongkok dibagi kedalam dua perusahaan yang memiliki fungsi yang berbeda, *China Defense Electronics Complex* pada tahun 2002 berganti nama menjadi *China Elektronik Teknologi Corporation*.⁶⁸ Pada tahun 2002, industri pertahanan Tiongkok dari cacatan pemerintah memiliki 141 ahli, yang terdiri: 52 akademisi ahli dari *Chinese Academy of Academy of Science* dan 95 akademisi ahli *Chinese Academy of Engineering*, yang enam orang diantaranya berasal dari kedua akademisi tersebut.

Kemajuan industri pertahanan Tiongkok tidak hanya sebatas pada perbaikan pengelolaan, tetapi juga dari ukuran *output* industri. Hal ini diawali dengan peningkatan 19% produksi dan 14% perdagangan yang membuat Tiongkok mencatatkan *breakeven point* pada industri pertahanan di tahun 2002 pasca kerugian yang dialami lebih dari delapan tahun. Meskipun keuntungan ini sebagian besar dihasilkan oleh sektor industri misil perkapalan, dengan keseluruhan kapasitas industri yang dimilikinya mencakup 1.000 anak perusahaan, tiga juta pekerja, serta dukungan total 300.000 tenaga ahli, Tiongkok menjadi yang memiliki industri pertahanan terbesar. Jaringan industri pertahanan dengan modal sumber daya yang dimilikinya Tiongkok kemudian mampu mengembangkan industri pertahanan hingga mencakup produksi berbagai skala peralatan dan sistem persenjataan, yaitu: *small arms, armored vehicles*, pesawat tempur, kapal perang, kapal selam, senjata nuklir dan *intercontinental ballistic missiles (ICBM)*.⁶⁹

⁶⁸ Roger Cliff, "Advance Underway in China's Defense industries," (RAND: Maret 2006), hal 1- 2
http://www.rand.org/content/dam/randpubs/testimonies/2006/RAND_CT256.pdf (Diakses pada 3 Agustus 2018).

⁶⁹ Richard A. Bitzinger, "The China's Defense Industry: Reform Without Improvement" (The James Tow Foundation). http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&t_tnews (Diakses pada 1 Oktober 2018).

Jika dilihat dari jenisnya, industri pesawat terbang dan produksi misil Tiongkok merupakan salah satu yang paling progresif dalam tahun 2002 – 2010. Dalam industri penerbangan, Tiongkok telah berhasil memproduksi pesawat untuk kebutuhan sipil : yaitu: *Xinzhou 60, ARJ21, Y-12E, ERJI45, Xiaoying 500*; juga beberapa tipe helicopter EC120 (kerjasama Tiongkok, Perancis, Singapura), Z-11 dan Z-9, yang juga mencatat bahwa Tiongkok sebagai negara yang terintegrasi dalam industri pesawat terbang internasional. Untuk kebutuhan militer, beberapa hasil produksi Tiongkok melalui *Syengyang Aircraft Corporation* adalah : Su – 27 *fighters* yang sebanding dengan F- 15, J- 10 yang sebanding dengan peforma f – 16, hingga J- 20 *stealth fighter* yang memiliki teknologi serupa dengan F -117 Milik AS. Sedangkan dalam produksi misil domestik, beberapa jenis yang telah diproduksi Tiongkok dengan penerapan teknologi tinggi adalah : PL-9 *infrared-homing air – to –air missile* yang setara kapabilitasnya dengan *U.S AIM – 9M”sidewinder,”SA – 10 surface- to- air missile system*, PL- 12 *active radar guided missile* yang sebanding dengan U.S AIM – 120 ”AMRAAM”, serta C-802 *anti-ship missile*.⁷⁰

Industri teknologi luar angkasa Tiongkok juga merupakan salah satu yang mengalami kemajuan di periode 2002 – 2010, bahkan sejak tahun 1996. Terhitung dari waktu tersebut, hingga tahun 2002 Tiongkok dengan *Long March* (roket pengangkut), telah berhasil meluncurkan 27 satelit asing, bahkan hingga tahun 2003 Tiongkok tercatat telah melakukan 41 peluncuran roket ruang angkasa. Selain itu, Tiongkok juga berhasil meluncurkan tiga kali pesawat luar angkasa tanpa awak pada tahun 1999, 2001 dan 2002; dan peluncuran ”*Shenzhou V*” pesawat antariksa pertama Tiongkok dengan awak pada Oktober 2003. Hingga 2004, untuk kebutuhan pertahanan dan sipil berbagai satelit pendukung nasional telah diluncurkan, mencakup SSO (*Sun Synronous Orbit*), *satelit*

⁷⁰ Roger Cliff, hal 1-2

meteorogikal GEO (*Geostationary Orbit*) satelit meteorogikal, satelit eceonografi HY -1, serta CBERS (satelit bernama Cina – Brazil).

3.1.6 Peningkatan Senjata PLA

Dalam sektor alutsista Tiongkok telah melakukan modernisasi peralatan militer yang membuat Tiongkok menjadi salah satu negara yang kuat dalam bidang militer. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Huffington yang berjudul “ *China Land s first jet on its Aircraft carrier*” dinyatakan bahwa Tiongkok telah membeli peralatan militer seperti kapal perang, kapal induk lionning, dan teknologi nuklir, dan dalam “ *China military Strenght*” dituliskan jika pasukan Tiongkok berjumlah 2,28 juta disertai pasukan aktif sebanyak 800 ribu disertai pasukan cadangan.

3.1.61 Kekuatan Darat.

Besarnya jumlah kekuatan darat Tiongkok disebabkan adanya tujuh wilayah militernya, yang terdiri dari 28 provinsi distrik militer, 4 komando Garnisum, kekuatan tank dari berbagai tipe. pada tahun 2011 tercatat jika Tiongkok memiliki *Light Tanks* 1200, *MBT's* 9750, *Artillery Towed* 6246, *APC* 3398, *Artelery MRL* 1770, *Artillery Self* 1710, *AIFV* 1490 yang melengkapi kekuatan tempur Tiongkok.⁷¹ Penambahan peralatan tempur ini dilakukan seiring dengan tingkatan keamanan negara Tiongkok yang diperlukan jika terjadi ketidakstabilan keamanan dalam negeri Tiongkok sehingga dilakukanlah pembentukan wilayah darat.

⁷¹ Sharma Graurav, "People's Liberation Army Ground Forces Modernisation An Assement," www.clawn/image/journals doc/sw. (Diakses pada 3 Agustus 2018).

3.1.6.1 Kekuatan Laut

Untuk kekuatan laut Tiongkok memiliki perhatian yang besar disebabkan sengketa teritorial yang terjadi dimana, kekuatan laut Tiongkok mengalami peningkatan tajam sejak 2010. Kekuatan laut Tiongkok mengembangkan armada kapalnya seperti kapal selam, kapal pengangkut (*Aircraft*) dan kapal angkataan laut PLAN yang lengkap dengan rudal jelajah modern (ACMs). Kemudian Tiongkok juga melakukan modernisasi armada PLANya yang kemudian dikenal sebagai armada laut terkuat di kawasan Asia Timur.

Untuk kekuatan laut Tiongkok memiliki semua prasyarat yang diperlukan untuk pengembangan pertempuran *Carrier Group* (kapal induk yang didukung oleh kapal selam, kapal perusak dan fregat) yang akan memungkinkan untuk melakukan operasi penjangkauan untuk ekspedisi yang jauh.⁷²

Peningkatan *submarine destroyer* dan *frigate* ini adalah suatu bentuk jika peningkatan senjata di wilayah laut adalah peningkatan dalam jumlah besar. Laut adalah sektor yang menjadi perhatian utama Tiongkok disebabkan keinginan negara Tiongkok menjadi negara dengan kekuatan laut yang kuat dan ambisi menjadi negara dengan penjelajah samudra membuat Jepang memiliki perhatian khusus terhadap kekuatan lautnya. Berikut ini data kekuatan submarine, destroyer dan frigates PLAN Tiongkok dari 2010 hingga 2020.

3.5 Tabel Submarine, Destroyer dan Frigate Tiongkok Tahun 2010 – 2010.

Class	Type	2010	2015	2020
Submarines		63	71	78
SSBN Jin	Type 094	2	4	5
SSBN Xia	Type 092	1	-	-
SSN Shang	Type 093	3	4	6

⁷² Nora Vanaga, "China's military rise : the lack of transparency and internal political uncertainty" national defense academy of latvia center for security and strategic research (diakses pada 2 Oktober 2018) di https://www.naa.mil-iv/naa/files/document/12_SA_8_China.pdf.

SSN Han	Type 091	4	2	1
SS Kilo	Sov Kilo	12	12	12
SS NEWCON	Song/Yuan	-	10	20
SS Yuan	Type 041	2	2	2
SS Song	Type 039	20	20	20
SS Ming	Type 035	17	15	12
SSB Golf	Type 031	1	1	1
SS Wuhan	Type 033G	1	1	1
SS Romeo	Type 033G	-	-	-
SS Whiskey	Type 03	-	-	-
Destroyer		26	5	26
DDG Luzhou	Type 051C	3	6	9
DDG Hangzhou	Sovremenny	4	4	4
DDG Luyang II	Type 052C	3	4	6
DDG Luyang II	Type 052B	2	2	2
DDG Luhai	Type 052 A	1	1	1
DDG Luda	Type 051	11	6	2
DD Anshan	Type 07	-	-	-
Frigates		47	47	47
FFG Jiangkai	Type 054	12	22	28
FFG Jiangwei II	Type 057	10	10	10
FFG Jiangwei I	Type 055	4	4	4
FFG Jianghu	Type 053	11	11	5
FFG Jiangdong	Type 053 K	-	-	-
FF Jiangnan	Type 53	-	-	-
FF Chengdu	Type 01	-	-	-

sumber: Binh Nguyen, *The People's Liberation Army Navy: The Motivation Behind Beijing's Naval Modernization*. Philadelphia (Thesis: university of Pennsylvania), 2013, hal 53

Dari tabel diatas dijelaskan jika negara Tiongkok melakukan peningkatan kekuatan laut dengan kekuatan yang besar, peningkatan ini dilakukan Tiongkok seiring dengan sengketa teritorial yang terjadi di Laut Timur Tiongkok, dan penegasan jika Tiongkok ingin menjadi negara maritim terkuat serta penjelajah lautan, dan ini adalah bukti jika Tiongkok memiliki perhatian yang besar terkait maritimya.

3.1.6.2 Kekuatan Udara

Setelah meningkatkan darat dan laut Tiongkok juga meningkatkan kekuatan udaranya. Dalam meningkatkan angkatan udara negara Tiongkok mulai dengan melakukan produksi pesawat sipil dan pesawat tempurnya sendiri dengan tipe J – 10, J – 11, J – 20, J –

31 dan Su 30 MKK, negara Tiongkok juga melakukan rekayasa beberapa pesawat diantaranya AS – 350 Prancis yang kemudian diproduksi ulang sebagai (Z – 11 19), *Aspide AAM/SAM* Italia diproduksi ulang sebagai *PL – 11 AAM dan Ly – 60 SA*.⁷³

People Liberation Army Air Forces (PLAAF) melakukan modernisasi tahun 2011, saat ini PLAAF telah memiliki 25 penerbang luar biasa. Angkatan udara antariksa, bahkan Angkatan Luar Angkasa Nasional Udara AS (NASIC) menyatakan jika Tiongkok akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan udara terkemuka di dunia pada tahun 2020. Negara Tiongkok telah menambahkan rudal canggih untuk meningkatkan kekuatan udara dengan peringatan dini, *Shenyang Aircraft Corp* dan *Cengdu Air Craft Industry Group* yang berjumlah 4000 pesawat yang berkarakteristik aerodinamis dan persenjataan setara dengan pesawat tempur AS, kecuali F-22. PLAAF mendeskripsikan struktur kekuatannya sebagai sistem dua lapis, PLAAF juga telah membentuk senjata utama sistem peralatan generasi kedua.⁷⁴ Pada tahun 2012 Tiongkok melaporkan jika negaranya memiliki 1.570 penerbang, 550 pengebom, 300 pesawat angkut ditambah 1.4500 pesawat tua sebagai inventaris PLAAF.⁷⁵

Pasukan tempur Tiongkok menjadi semakin besar dan berkembang dengan banyak pesawat tempur yang digunakan untuk perang. Bagi negara Tiongkok memiliki armada terbang yang banyak bukanlah sesuatu yang memberatkan negaranya karena Tiongkok memiliki kemampuan anggaran serta personel dan peralatan tempur yang banyak. Tiongkok menyadari jika ruang udara akan menjadi kekuatan terpenting Tiongkok

⁷³ Wiseman Jhosua, Kandon Isqas, Rushei Riss dan D Cristpher, "China's out of Area Naval Operations: Case studies, Trajectories, Obstacles, and Potential Solution," [ndupress.edu/portals GP/Documents/Stratperspective/China/China Perspektive](http://ndupress.edu/portals/GP/Documents/Stratperspective/China/China%20Perspektive).

⁷⁴ Bothan Negim & Moris J.Lyle, "From Theory to Practice People's Liberation Army Force, Aviation Training at the Operational Unit," <https://www.RAND.org/content/dam/rand/pubs/research/RR1400/RR1415/>

⁷⁵ Bothan Negim hal.115

setelah meningkatnya kemampuan militer Tiongkok di area laut. Tiongkok hanya butuh waktu satu dekade untuk melakukan perubahan terhadap kekuatan udaranya. Berikut ini tabel pesawat tempur yang dimiliki Tiongkok.

3.6 Tabel Pesawat Tempur Tiongkok.

Mainstay	Maker	Type	Rand	Amr
	Chengdu	J – 10	120	200
	Sukhoi	Su – 30	73	76
	Shenyang	J – 11 A	116	140
	Shenyang	J – 11 B	18	
	Xion	JH – 7	72	70
Sub total			399	486
Suplement				
	Shenyang	J – 8	312	360
	Chengdu	J – 7	552	350
	Nachang	Q – 5	120	130
Sub total			986	840
Figher/attack			1.383	1.326
Strategis Bomber	Xiam	H – 6	82	120

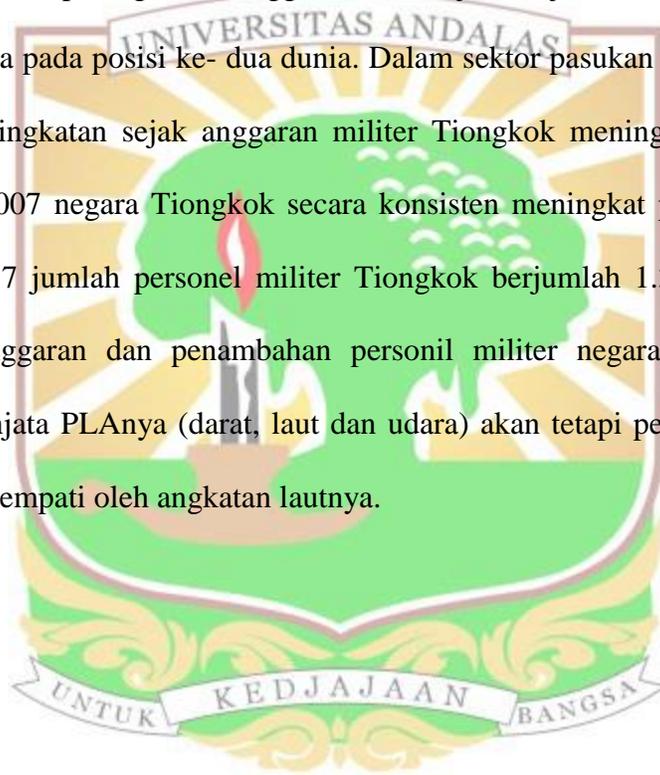
Sumber: Asian Military Review the Amr Regional Air Force dictory 2012.

Tabel diatas menjelaskan jika Tiongkok memiliki pesawat tempur dan pesawat serang ditambah pembom strategis H – 6, Tiongkok memiliki 400 penyerang kelas generasi keempat, menurut seorang analisis AS negara Tiongkok mementingkan teknologi rudal udara ke udara. Sebelumnya Tiongkok mengandalkan imitasi dari AIM – tetapi sekarang Tiongkok memiliki rudal udara.

Sebelumnya Tiongkok mengandalkan imitasi dari AIM – tetapi sekarang Tiongkok memiliki rudal udara jarak pendek dan jarak menengah yang canggih, dengan tipe R – 27//AA – 10, radar. Semi aktif/ rudal inframerah: inframerah memandu R -731 AA – 11 dengan jangkauan 18,6 mil: radar aktif homing R – 77//AA – 12 dengan jangkauan 31 hingga 51 mil. Laporan dari *Global Fire Global* pada tahun 2017 Tiongkok telah

memiliki 3.035 pesawat, 1.125 frigater, 1.527 penyerang, 353 pesawat pelatih, 985 helikopter, 281 helikopter penyerang, 716 kendaraan penyerang, 2000 artillery dan 50 penghancur.

Kesimpulan dari bab ini adalah peningkatan kapabilitas militer Tiongkok dilakukan dalam 4 sektor yaitu, anggaran militer, penambahan personil militer, peningkatan pertahanan dan peningkatan senjata PLA (darat, laut dan udara). Untuk anggaran militer, peningkatan anggaran ini terjadi sejak tahun 2010 saat ekonomi Tiongkok berada pada posisi ke- dua dunia. Dalam sektor pasukan militer, pasukan militer mengalami peningkatan sejak anggaran militer Tiongkok meningkat, sejak tahun 2011, hingga tahun 2007 negara Tiongkok secara konsisten meningkat personil militernya dan pada tahun 2017 jumlah personel militer Tiongkok berjumlah 1.368.199.4021. Setelah peningkatan anggaran dan penambahan personil militer negara Tiongkok melakukan modernisasi senjata PLAnya (darat, laut dan udara) akan tetapi peningkatan senjata yang paling tinggi ditempati oleh angkatan lautnya.



BAB IV

RESPON JEPANG TERHADAP PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER TIONGKOK

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tindakan Jepang terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok dan respon Jepang dalam menghadapi peningkatan kapabilitas militer negara Tiongkok. Respon Jepang terhadap Tiongkok akan dilihat melalui perbedaan ofensif dan defensif yang ditentukan oleh 4 kategori yaitu: Ideologi, kebijakan terhadap minoritas domestik, kebijakan terhadap negara tetangga yang lemah, serta kebijakan militer dan pengawasan persenjataan.

4.1 Tindakan Jepang Terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer Tiongkok.

Jepang adalah negara yang berlokasi di Asia Timur, kesejahteraan Jepang dipengaruhi oleh kepentingan strategis kawasan ini, lokasi geografis Jepang dikelilingi oleh laut sebagaimana dicantumkan dalam Pedoman Program Jepang (NDPG) 2014 yang berbunyi

“ Japan is surrounded by the sea, and has a long coastline, numerous remote island and a vast Exclusive Economic Zone (ZEE), Japan is a maritime state and dependent largely on international trade for its supply of food and natural resources.

(Japan’s 2014 National Defense Program Guideline)

Dalam NDPG tersebut telah disebutkan bahwa Jepang mengidentifikasi jika negara mereka adalah negara maritim yang bergantung pada transportasi laut untuk mengimpor sumber daya seperti energi karenanya jalur laut adalah kawasan vital bagi kelangsungan kehidupan negara Jepang. Sehingga kemunculan negara Tiongkok dengan peningkatan militernya menjadi ancaman yang berbahaya bagi negara Jepang

dikarenakan kedekatan kedua negara ini yang berdampak pada keamanan negara Jepang itu sendiri.

Dalam bab 1 telah dijelaskan jika pada buku putih pertahanan Jepang yang ditulis pada 2010 dinyatakan jika, ” Tiongkok meningkatkan aktivitasnya diperairan dekat Jepang dan kurangnya transparansi kebijakan pertahanan nasional Tiongkok serta kegiatan militer adalah suatu masalah yang terjadi dikawasan dan komunitas internasional termasuk Jepang perlu dianalisis lebih cermat.

Tiongkok menjadi ancaman bagi keamanan Jepang telah terlihat sejak Tiongkok berada dibawah kepemimpinan Xi Jinping yang mulai terlihat tegas, terutama dalam ekspansi maritimnya (Matsuda, 2014). Tiongkok juga meningkatkan tekanan yang cukup banyak terhadap Jepang melalui Laut Timur, kegiatan di Laut Timur dan Laut Selatan menunjukkan bahwa dalam hal sistem geopolitik, sejarah dan dimesi sosial budaya, Tiongkok dianggap sebagai ancaman bagi Jepang. Permusuhan yang telah menjadi sejarah hubungan Jepang dan Tiongkok telah menunjukkan banyaknya hubungan buruk diantara mereka. Ancaman Tiongkok ke Jepang dicontohkan dengan kebangkitan ekonomi yang cepat dari negara Tiongkok.

Tabel 4.1 Ancaman Tiongkok Terhadap Jepang

	Struktural Dimension	Geopolitical System	Historical Dimension	Socio,cultural Dimension	Economic Dimension
Specific	√	√	√	√	√
Difusi	√	√	√	√	√

Immediate	√	√	√	√	√
Remote	-	-	-	-	-
Probability	√	√	√	√	√
Severe	√	√	√	√	√

Modernisasi militer yang dilakukan oleh negara Tiongkok membuat Jepang melakukan modernisasi dalam militernya. Berikut ini beberapa tindakan Jepang terhadap melakukan modernisasi militernya

Tabel 4.1.2 *Japan's Plans For its Military Modernization*

Insure security of the sea and airspace Surrounding Japan	Acquire fixed – patrol aircraft (D – 1), acquire patrol helicopter (SH.60 K),contract a submarme, acquire part of the ummanned new early – warning aircraft (E- 20) and equire part of the ummanned.
Response to attract on remote island	Peploy a coast observation unit to cover yonaguni island, acquire fighter (F-354) newly establish the 9th Air Wing due two suaqdrons added to the figher aircraft units at Naha air Base,conduct a study towards the construction of a new destroyer, acquire V- 22 ospreys, acquire and amphibious vehicle (AAV7),upgrade the osumi – class LST in order to enhance its transport capability in ampbbibious operations, conduct research to discuss transport capability in. Ampbbibious operations, conduct research to discus with respect to the use of the private sector maritime transport,etc.
Response to ballistic missile attract	Contract an degis – equiped destroyer,conduct Japan – U.S. cooperative development of advanced ballistic missile interceptor (Sm – 3 Block II A), recentify PAC – 3 missiles, develop infrastructure for the PAC – 3 unit deployment in ichigaya .etc
Response in outhter space	Study on spesification of the space surveillance system emprical researh on dual – wavelength infrared sensor technology in outer space,utilize the advanced land observing satellite -2 ‘DAICHI-2’.
Response in cyber space	Strengthen functions for the cyber exercises environment (cyber range), implement initiatives to introduce serious games (educational games) as from of practical educational material and educational program.
Response to large – scale disasters	Maintain and strengthen function of camps and bases

	that wil serve as hubs during a disaster, improve alternative functions in case the ichigaya.building becomes damaged to e disaster, acquire double arm coulutton machieves.etc.
Strengtening intelligence capabilities	Enhance. HUMNT gathering capabilities, enhance research capabilities in relation to public information gathering through the analysis of big, strengthem thes system related to defense attaches.

source: ministry of defense, Japan .2015

4.2. Analisis Respon Jepang Terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok.

4.2.1.Ideologi Negara Jepang.

Menurut konstitusi 1947 Jepang adalah negara yang menganut sistem monarki parlementer dibawah pimpinan kaisar dan parlemen Jepang. Konstitusi (Undang – Undang Dasar) Jepang mulai berlaku pada tahun 1947. Berdasarkan pada prinsip: Kedaulatan Rakyat, hormat terhadap hak – hak asasi manusia dan penolakan perang. Dalam konstitusi Jepang menetapkan 3 badan pemerintahan yaitu: Badan Legislatif (Diet atau Parlemen), Badan Eksekutif (Kabinet) dan Badan Yudikatif (Pengadilan).⁷⁶

Dalam perkembangan ideologinya, Jepang terkenal sejak Restorasi Meiji menggantikan Tokugawa yang terkenal dengan masa isolasi Jepang dan digulingkan di tahun 1858, ditahun 1868 sampai pada tahun 1945. Ideologi Jepang mengalami perubahan dari Restorasi Meiji yang membuat berlakunya konstitusi Meiji pada tahun 1889, pada saat itu disajikan 2 konsep politik yang berlawanan yaitu: pemerintahan demokrasi liberal tipe Inggris dan pemerintahan otoriter tipe Jerman. Pada tahun 1889 Jepang memperkenalkan konstitusi modern pertamanya yang mengikuti rezim otoritarian Jerman. Pada tahun 1990 terjadi reformasi demokrasi dengan alasan bangkitnya kelas menengah dan pekerja sebagai kekuatan yang terlihat dan independen, masa ini dikenal

⁷⁶ Bulmer Elliot, "Constitutional Monarch in Parliamentary Democracies," <http://www.idea.int/sites/default/files/publicationns/constitutional-monarch-in-parliamentary-democracies-primer>.

dengan “*Taisho Democracy*”, kemudian pada tahun 1930 hingga 1945 Jepang terlibat kolonial Asia Pasifik. Setelah Perang Dunia II hingga masa sekarang Jepang dikenal dengan negara yang memiliki ideologi nasionalismenya.

Nasionalisme adalah ideologi politik dimana suatu negara mengklaim hak – hak atas suatu negara. Nasionalisme terbagi 2 jenis yaitu: Nasionalisme etnik dan nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan adalah sebuah ideologi yang dibangun berdasarkan kewarganegaraan dan menjadi identitas politiknya. Negara Jepang negara dengan ideologi nasionalisme etnik yang mengedepankan identitas nasional, leluhur, bahasa, (pakaian, masakan, adat istiadat, sejarah) dan agama yang dijadikan patokan dalam nasionalismenya.

Dalam politik Jepang selalu berorientasi kepada etnisitas dan loyalitas politiknya, sebab bagi Jepang identitas dijadikan sebagai sebuah negara bermula dari etnisitas dan menjadi jati diri bagi negara Jepang, dalam setiap kebijakan negara Jepang tidak melupakan identitas nasionalnya. Meskipun negara Jepang adalah negara yang tidak mengalami penjajahan dari bangsa barat, akan tetapi nasionalisme etnik Jepang telah ada sejak politik isolasi yang dilakukan Tokugawa, politik isolasi tersebut membuat pembentukan jiwa ke Jepang masyarakat Jepang dan menumbuhkan kesadaran serta cinta kepada negaranya. Sebagai sebuah ideologi bagi Jepang nasionalismenya memiliki 3 fungsi yaitu:⁷⁷

1. Mengikat semua kelas warga negaranya.
2. Menyatukan mentalitas warga negaranya.
3. Membangun dan memperkuat kebijakan yang diambil oleh negaranya.

⁷⁷ Bulmer Elliot hal 28.

Ideologi nasionalisme adalah prinsip politik yang menyatakan jika unit politik dan nasional harus berjalan kongruen.⁷⁸ Nasionalisme sebagai ideologi juga memiliki nilai – nilai khusus karena mereka memiliki otonomi sebagai negara yang berdaulat tinggi, memegang wilayah yang dicirikan dengan hukum sebagai penggunaan hukum yang sah. Prinsip dasar dari nasionalisme adalah bangsa yang unik berdasarkan sejarah.

Dalam nasionalisme etnik dinyatakan jika budaya adalah sarana dan nilai – nilai dari negara adalah tujuannya. Setiap budaya nasional menjadi nilai – nilai dari politik mereka. Dalam hal ini negara Jepang beruntung sebab memiliki alat pemersatu bagi negaranya tanpa melupakan identitasnya yaitu ”sistem kekaisaran” yang menyatakan dengan tegas jika negara Jepang adalah negara nasionalis yang mengedepankan etnis mereka.⁷⁹

Dalam bab 1 dijelaskan jika perbedaan ofensif dan defensif secara ideologi adalah bagi negara ofensif memiliki sifat agresif yang berkarakteristik dengan ideologi ekstrim/anarki dan tidak toleran, sedangkan bagi negara defensif justru sebaliknya negara defensif cenderung memiliki toleran dan tidak ekstrim, sebagai negara dengan ideologi nasionalisme Jepang memperlihatkan jika negaranya merupakan negara yang agresif dan menjadi negara yang tidak anarki karena Jepang muncul dengan ideologi nasionalisme etniknya yang mengedepankan identitas nasionalnya serta budaya leluhurnya. Negara Jepang juga tidak memaksakan ideologinya terhadap negara lain disebabkan negaranya bukan negara otoriter.

⁷⁸ Haris Naylomas,” Nationalism and Foreign Policy,”<https://www.researchgate.net/publication/320162742-nationalism-and-foreign-policy>.

⁷⁹ Mudji Hartoni,” Nasionalisme Asia Timur”
<https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/download/4388/3820>.

Jepang dikatakan sebagai negara yang memegang ideologi defensif juga karena negara Jepang sangat mematuhi budaya leluhur mereka seperti budaya tidak berperang, penolakan perang dijadikan sebagai pedoman terhadap pemberlakuan konstitusi atau undang – undang dasar Jepang sementara bagi negara dengan ofensif cenderung agresif dan peka terhadap peperangan dalam ideologi ofensif, negara cenderung memiliki sifat ekstrim/ anarki yang digunakan untuk memaksimalkan pengaruh serta memaksimalkan kekuatan mereka terhadap negara lain. Dalam penjabaran diatas dapat disimpulkan, jika dilihat dari konsep mengenai perbedaan ofensif dan defensif secara ideologi maka negara Jepang adalah negara yang defensif sebab ideologi yang dipegang Jepang adalah nasionalisme yang mengedepankan cinta perdamaian dan tidak memaksakan ideologinya kepada negara lain.

4.2.2 Kebijakan Terhadap Politik Domestik

Dalam hal kebijakan politik domestik dikatakan jika dalam pandangan ofensif pemimpin tidak ragu dalam mendiskriminasi masyarakat disekitarnya cenderung tidak akan ragu untuk menyerang negara lain sebab dalam pandangan ofensif diskriminasi adalah hal yang tidak akan luput dalam sistem internasional.⁸⁰ Sementara dalam pandangan defensif kebijakan domestik akan memberikan pandangan terhadap kondisi musuh yang pada akhirnya akan melahirkan kebijakan suatu negara. Dalam hal ini terlihat jelas jika pada masa pemerintahan Abe telah nampak bahwa sejak tahun 2010 peningkatan anggaran militer yang besar serta mulai munculnya sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Timur yang menyebabkan terjadinya perubahan kebangkitan keamanan dari (*Basic Defense Force*) menjadi (*Dynamic Defense Force*) dan juga kebijakan Jepang mengenai kenaikan anggaran militer yang akan menuju peningkatan yang besar.

⁸⁰ Diambil dari bab 1

Seperti yang telah diketahui bahwa pada dahulunya negara Jepang tidak memperhatikan hal – hal yang berhubungan dengan pertahanan mereka, karena negara Jepang tidak menyerahkan seluruh jaminan pertahanan mereka ke negara Amerika, tetapi hal ini berubah saat Abe menjadi perdana menteri, perubahan politik domestik negara Jepang telah merubah tatanan terhadap konsep pertahanan negara Jepang, setidaknya ada 3 pilar perubahan yang dilakukan oleh Abe dalam menghadapi Tiongkok yaitu dengan membentuk Dewan Keamanan Nasional (NSC), membangun Strategi Keamanan Nasional (NSS) yang komprehensif serta memperbarui Pedoman Program Pertahanan (NDPG).⁸¹

Shinzo Abe melihat jika peningkatan kapabilitas militer Tiongkok adalah hal yang akan membahayakan negaranya sehingga diperlukan kebijakan baru merespon tindakan Tiongkok tersebut. Garis besar pertahanan Tiongkok pada Desember 2010, berpedoman pada pertahanan sebelumnya yang dikeluarkan pada tahun 1976,1995 dan 2004.⁸² Hal yang paling penting dalam siste kelembagaan. NSC ini adalah suatu badan yang dibentuk dan ditugaskan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan keamanan nasional dan memastikan perencanaan serta koordinasi antar lembaga yang cepat dan efektif. Perubahan kebijakan pertahanann mencerminkan jika Jepang mulai mengedepankan keamanan yang memerlukan kebijakan luar negri jangka panjang. Peran dari NSC diharapkan mampu memberikan integrasi kebijakan yang lebih baik untuk mengatasi lingkungan keamanan dalam institusi internasional.

Pertahanan Jepang yang baru ini berpedoman untuk mengatur strukturisasi ulang dan lokasi untuk angkatan bersenjata Jepang. Upaya – upaya ini dilakukan bertujuan

⁸¹ Adam Liff,” Japan defense Policy: abe the Evolutionary,”[www.adamphaliff.com/document lift2015_two_Abe Abe The Evolutionary](http://www.adamphaliff.com/document%20lift2015_two_Abe%20The%20Evolutionary) (Diakses pada 1 Agustus 2018).

⁸² Axel Berkosfly,” Japan’s and Security Policies What’s Old, What’s Ahead,”www.kas.de/c/dokumen_Library-file.

untuk merasionalisasi kebijakan pertahanan Jepang serta lembaganya untuk membangun pertahanan Jepang. Pada tahun 2010 pertahanan Jepang mulai fokus pada “Pasukan Bela Diri” (SDF) atau dalam bahasa Jepang disebut *Jietai* muncul dengan kekuatan dan peralatan bereaksi terhadap krisis skenario pertahanan Jepang di wilayah daratan. Bertujuan untuk melengkapi militer angkatan laut dan penjaga pantai untuk mencegah dan menangkal instruksi Tiongkok ke Jepang.

Agar bisa dikendalikan di perairan teritorial di Laut Tiongkok Timur. Jepang mengeluarkan 1,9% dari pendapatan PDBnya untuk biaya pertahanan dimulai pertama kali tahun 2011, dan ini adalah jumlah yang besar yang dilakukan Jepang jika dilihat dari tahun – tahun sebelumnya. Setelah perang salah satu masalah politik domestik Jepang adalah tentang konstitusi pasal 9 yang menegaskan jika Jepang menolak adanya perang dan angkatan laut, darat dan udara tidak akan diakui dan dikelola serta hak negara untuk perang tidak diakui, kemudian pada Mei 2014 Abe menyetujui keputusan tentang pembangunan, keamanan untuk memastikan kelangsungan hidup rakyat Jepang.⁸³

Kebijakan baru ini menjadi awal dalam sejarah pertahanan Jepang sebab memberi isyarat jika Jepang akan melampaui batasan ketat dalam penggunaan kekuatannya dalam pertahanan negaranya. Kondisi Tiongkok yang selalu membahayakan Jepang membuat negara Jepang mengeluarkan kebijakan – kebijakan terhadap perlindungan negaranya. Peningkatan kapabilitas militer Tiongkok dan tindakan – tindakan di perairan Jepang menjadi faktor pemicu perubahan kebijakan – kebijakan yang berhubungan dengan keamanan yang dilakukan oleh negara Jepang telah memperlihatkan dengan jelas jika kondisi musuh melahirkan kebijakan di suatu negara. Jepang mulai merasa jika

⁸³ Hiroshi Nakanishi, "Reorienting Japan Security Transformation Under the Second Cabinet," Asian Perspective No 39. 2015.

Tiongkok adalah musuhnya sebagaimana pernyataan *white paper* Jepang pada tahun 2011 berbunyi:

“ Some on these ten vesels conducted exercises in the middle of East China sea before advancing for the pacific Ocean. At the time, a chinese shipborne cobducte a to a proximate fight towards and japanese destroyer Suzumi,which was monitoring the Chinese Vessel. At it nears it nearest it came adistance of approximately 90 m horizontaly and the attitude was approximately 30 m. Since it was recognized that flying in his maner posed a danger to safe navigation of the Jappanese Vessels, the recognition was conveyered to the Chinses government to inquire after fact via diplomatic router.Later another Chinese Shipborne.⁸⁴

Pernyataan ini adalah sebuah bentuk ketegasan jika negara Tiongkok adalah tetangga yang membahayakan negara Jepang sehingga Jepang dituntut untuk melindungi negaranya dari tindakan – tindakan negara Tiongkok tersebut. Hal ini menjadikan negara Jepang memiliki kewaspadaan dengan negara tetangganya. Kondisi ini kemudian membuat Jepang melakukan perubahan terhadap negaranya khususnya dalam bidang keamanan, sebab Jepang tidak mampu menghentikan Tiongkok dengan peningkatan kapabilitas militer yang besar tersebut sehingga peningkatan keamanan negaranya dengan perubahan kebijakan Jepang.

Perubahan kebijakan Jepang yang baru ini terjadi karena ketakutan Jepang terhadap modernisasi militer Tiongkok yang pesat serta beberapa insiden yang terjadi di Laut Tiongkok Timur. Hal ini juga menunjukkan jika negara Jepang cenderung defensif dalam melihat peningkatan kapabilitas militer Tiongkok karena kondisi musuh melahirkan kebijakan dalam politik domestik suatu negara. Berdasarkan perbedaan dari ofensif dan defensif tersebut dalam kebijakan terhadap politik domestik negara Jepang kembali menunjukan jika mereka bersifat defensif dengan melahir kebijakan yang dilihat dari kondisi musuh.

⁸⁴ Diambil dari bab 1

4.2.3 Kebijakan Terhadap Negara Tetangga Yang Lemah

Kebijakan terhadap negara tetangga yang lemah adalah indikator ke- tiga dari perbedaan ofensif dan defensif . Dalam kebijakan terhadap negara tetangga yang lemah dikatan jika, negara yang agresif cenderung mendominasi dan bertujuan untuk mencaplok negara yang lemah. Negara ini memiliki motivasi untuk membentuk negara protektorat, negara protektorat adalah negara yang berada di bawah negara yang kuat dan cenderung tidak merdeka dan berdaulat, sedangkan negara Jepang bukanlah negara yang agresif dan cenderung mendominasi negara yang lemah, negara tetangga Jepang yang tergolong lemah dikawasan Asia Timur adalah Taiwan. Dibawah ini dapat dilihat gambar negara – negara yang ada dikawasan Asia Timur.



sumber. www.Genogelisia.2018.

Gambar 4.3 Negara – negara Tetangga Jepang

Gambar diatas telah menjelaskan jika dari geografinya negara Jepang berada dekat negara kuata seperti, Korea Selatan dan Tiongkok. Dilihat dari sektor militernya menurut survei dari *Global Fire Power* Tiongkok adalah negara ke tiga di bawah

Amerika Serikat dan Rusia, pada peringkat keempat ditempati oleh Jepang disusul oleh Korea Selatan yang berada pada posisi keenam. Dalam peta diatas terlihat jika negara tetangga Jepang dengan posisi sebagai negara lemah yaitu : Taiwan dibanding dengan negara tetangga Jepang lainnya.⁸⁵

Melihat hubungan Jepang dan Taiwan yang bermula sejak tahun 1895, tahun ke 21 kaisar Guangxu dan tahun ke 28 di era Meiji, sejak disahkannya perjanjian Shimoneki Taiwan menjadi koloni pertama dari kekaisaran Jepang. Selama tahun pertama awal pemerintahan Jepang di Taiwan perkembangan ekonomi adalah tujuan utama Jepang di Taiwan.⁸⁶ Pada masa Meiji negara Jepang menekankan pentingnya pendidikan untuk proses penguatan nasional dan Jepang mulai memperkenalkan pendidikan Jepang ke Taiwan. Taiwan berada dibawah koloni Jepang selama 1895 sampai tahun 1945.

Sejak masa kolonialisasinya hingga hari ini negara Jepang tidak melakukan dominasi terhadap negara Taiwan meskipun Jepang memiliki kesempatan untuk mencaplok Taiwan saat Taiwan berada dibawah koloni Jepang tahun 1945. Pada masa pemerintahan Abe, dinyatakan jika Taiwan adalah negara yang akan menjadi mitra penting Jepang dalam bidang keamanan seiring dengan ketegasan Tiongkok dengan peningkatan kapabilitas militernya di Asia Timur.⁸⁷ Dalam kebijakan terhadap negara yang lemah yang menjadi indikator ketiga dari perbedaan ofensif dan defensif, Jepang juga cenderung defensif karena negara Jepang tidak melakukan pencaplokan dan dominasi terhadap negara tetangganya yang lemah tersebut.

⁸⁵ Diana Zety, "Japanese Colonial Rule and Its Socio – Cultural Influence Taiwan hal 9.

⁸⁶ Diana Zety hal 7.

⁸⁷ Emily S Chen, "Japan's Practical Taiwan Policy", <https://thediplomat.com/2017>. (Diakses 2 November 2018)

4.2.4 Kebijakan Militer Dan Pengawasan Persenjataan.

Kebijakan militer dan pengawasan persenjataan menjadi indikator keempat dalam melihat perbedaan ofensif dan defensif, sebab pengawasan persenjataan adalah suatu cara yang dominan dibuat untuk pencegahan perubahan secara struktural untuk karakteristik dari operasional militer negara itu sendiri. Pengawasan persenjataan menjadi upaya untuk membuat perjanjian yang mengikat secara hukum, dan bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya perang. Dalam kebijakan militer negara yang ofensif cenderung melihat jika terjadi ketidakpastian dalam sistem internasional yang berdampak pada keamanan sehingga membuat negara – negara saling curiga satu sama lainnya.

Sementara defensif melihat penyebab dari dilema kewanitaan itu sendiri. Menurut Glaser negara yang berusaha untuk menurunkan kapabilitas militer mereka dan berusaha menjadi negara yang defensif dan dipandang sebagai sinyal nyata.⁸⁸ Dalam kebijakan militer dan pengawasan persenjataan negara, defensif memilih bertahan dengan membangun pertahanan yang kuat atau menciptakan hubungan aliansi militer yang kuat. Sedangkan yang dilakukan negara Jepang terhadap kebijakannya adalah dengan membangun pertahanan yang kuat dan menciptakan aliansi militer yang kuat. Aliansi militer Jepang yang kuat adalah Amerika Serikat.⁸⁹

Jepang telah memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat sejak tahun 1990 yang berfokus pada masalah keamanan regional dan disaat yang sama negara Jepang juga melakukan operasi perdamaian dan bantuan keamanan. Keterlibatan Jepang yang proaktif terhadap keamanan membuat negara Jepang melakukan kebijakan defensif dikarenakan negara Jepang harus menjadi “negara nasional” yang kemudian membuat kerangka

⁸⁸ Diambil dari bab 1 hal 9.

⁸⁹ Kusunaki Ayako,” The debate on Japan’s Foreign policy During “The los two decades.

kerjasama.⁹⁰ Kebijakan luar negeri dan keamanan yang berstandar internasional yang tercantum dalam buku cetak birunya dikatakan jika negara Jepang harus menjadi negara normal dengan melakukan 2 hal yaitu:

1. Jepang harus menjadi bangsa yang rela memikul tanggung jawab yang dianggap wajar dalam komunitas internasional.
2. Jepang dituntut mau bekerjasama dengan negara lain untuk membangun kehidupan yang makmur dan stabil untuk menjaga rakyat mereka. Sebagai negara normal yang mencari status negara adikuasa, disatu sisi membuat Jepang melakukan strategi pertahanan yang menjadi strategi pembangunan nasional.

Berdasarkan kebijakan pertahanannya Jepang telah membangun kemampuan pertahanan atas dasar inisiatifnya. Sesuai dengan prinsip – prinsip dasar pertahanan kebijakan yang beroreantasi pada pertahanan secara eksklusif dan tidak menjadi negara militer yang mungkin akan menimbulkan ancaman konstitusi negaranya. Kebijakan pertahanan Jepang beroreantasi kepada:⁹¹

1. Kebijakan Khusus Yang Beroreantasi Pada Pertahanan

Kebijakan yang beroreantasi pada pertahanan eksklusif berarti bahwa kekuatan pertahanannya hanya digunakan jika terjadi serangan, kekuatan pertahanan hanya digunakan jika terjadi serangan. Kekuatan pertahanan dijaga seminimal mungkin untuk pertahanan diri, dan kemampuan pertahanan harus dimiliki dan dipertahankan oleh Jepang dengan terbatas dan hanya untuk pertahanan diri.

⁹⁰ Kusunaki Ayako hal 193

⁹¹ Japan's Ministry of Defense ,” National Defense Program Guideline.”www.mod.go.jp.

2. Tidak Akan Menjadi Negara Militer

Jepang tidak akan menjadi negara militer yang dapat menimbulkan ancaman bagi negara lain, artinya Jepang tidak akan mempertahankan militer yang kuat untuk menimbulkan ancaman negara lain diluar batas dan hanya akan menggunakan militernya untuk pertahanan diri.

3. Tiga Prinsip Non - Nuklir

Tiga prinsip non nuklir adalah prinsip tidak memiliki senjata nuklir, tidak memproduksi dan tidak membiarkannya dibawa ke Jepang. Jepang dengan kuat mempertahankan prinsip - prinsip tersebut sebagai jalur tetap dalam kebijakan nasionalnya. Selain itu ketentuan dalam undang - undang energi atom juga melarang Jepang untuk membuat dan memiliki senjata nuklir.

4. Mengamankan Kontrol Sipil

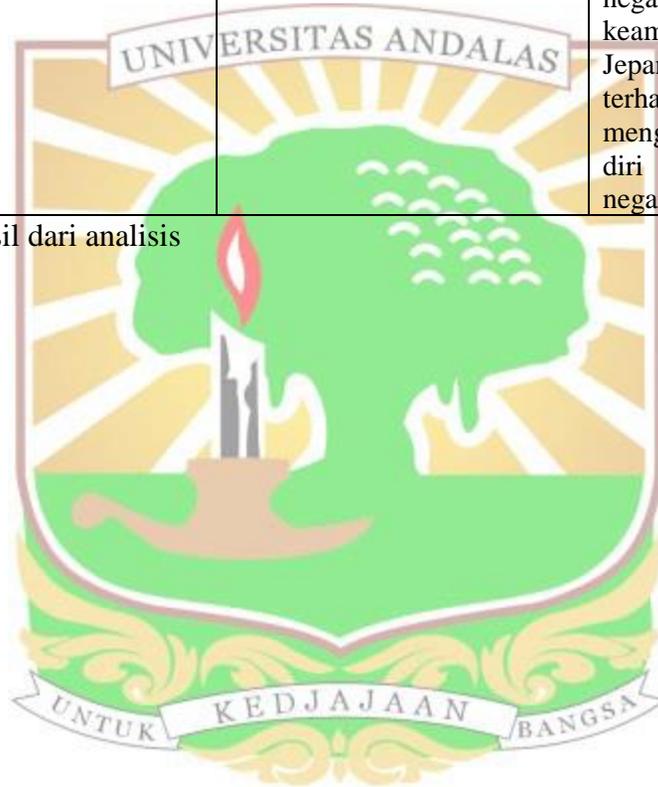
Kontrol sipil mengacu pada prioritas politik dan militer atau kontrol politik secara demokratis, sejak akhir Perang Dunia II, Jepang mengadopsi sistem kontrol sipil yang ketat dan sepenuhnya berbeda dan dilakukan dibawah konstitusi sebelumnya, untuk memastikan bahwa SDF harus dioperasikan atas kehendak rakyatnya.

4.4 Tabel Analisis Respon Jepang Terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer Tiongkok.

Kategori	Ofensif	Defensif
Ideologi	-	Jepang memiliki ideologi nasionalismya etnik yang mengedepankan cinta tanah air. Negara Jepang juga tidak agresif dalam memaksakan ideologinya terhadap negara lain.
Kebijakan terhadap politik Domestik	-	Jepang tidak melakukan diskriminasi terhadap masyarakat sekitarnya

		ataupun menyerang negara lain. Jepang lebih memilih untuk melakukan perubahan kebijakan terhadap negaranya seiring dengan perubahan kondisi musuhnya.
Kebijakan terhadap negara tetangga yang lemah	-	Jepang tidak melakukan dominasi terhadap negara yang lemah serta melakukan pencaplokan bagi negara itu
Kebijakan Militer dan Pengawasan persenjataan	-	Jepang memilih untuk bertahan dengan memperkuat aliansinya dan tetap menjadi negara yang menjaga keamanan regionalnya. Jepang tetap beroreantasi terhadap pertahanannya yang mengedepankan pertahanan diri dan tidak akan menjadi negara militer.

sumber: hasil dari analisis



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan jika respon Jepang terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok adalah defensif, dilihat dari 4 kategori perbedaan ofensif dan defensif Jepang lebih memilih merespon peningkatan kapabilitas militer Tiongkok dengan defensif seperti yang dipaparkan diatas jika perbedaan ofensif – defensif dilihat dari 4 kategori yaitu: ideologi, kebijakan terhadap minoritas domestik, kebijakan terhadap negara yang lemah, serta kebijakan militer dan pengawasan persenjataan. Berawal dari ideologi Jepang yang nasionalis dan tidak anarki, negara Jepang tidak menjadi negara yang anarki dan memakasakan ideologinya terhadap negara lain, yang membuat negara Jepang melakukan perubahan terhadap politik domestiknya seiring dengan kondisi musuhnya.

Dalam kebijakan terhadap negara yang lemah Jepang juga tidak melakukan dominasi atau mencaplok negara tersebut yang bertujuan untuk mengimbangi musuhnya dan dalam kebijakan persenjataan dikatakan jika negara Jepang tidak akan menjadi negara militer, negara Jepang hanya akan menggunakan militer untuk melindungi negaranya saja.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini penulis hanya menemukan data sekunder (kajian pustaka), diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat menemukan data primer (wawancara) sehingga dapat menemukan data yang lebih valid daripada penelitian ini.

